



INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KABUPATEN BULELENG TAHUN 2016

A. PENGANTAR

Om Swastyastu.

Sesanti Angayubagia / puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, berkat Asung Kertha Wara Nugraha – Nya, sehingga penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 sebagai implementasi amanat konstitusi dapat kami informasikan kepada masyarakat tepat waktu sebagaimana ketentuan peraturan perundang - undangan. Dengan terbitnya Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah mempertegas kewenangan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyampaian ILPPD Tahun 2016 ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun tata cara penyampaian ILPPD kepada masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyampaian ILPPD Kabupaten Buleleng Tahun 2016 kepada masyarakat pada dasarnya mengetengahkan gambaran kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng secara utuh sepanjang Tahun 2016, berdasarkan tolok ukur kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng 2012 – 2017, sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah, serta sebagai implementasi pencapaian sasaran terhadap program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tertuang melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2016. Dengan demikian gambaran kinerja tahun ini merupakan sebuah implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan.

Dan kami bersyukur, dengan keterbatasan dan kekurangan yang ada, pencapaian target kinerja di tahun 2016 dapat kami penuhi. Dan untuk target pembangunan yang belum tercapai secara optimal, akan kami jadikan refrensi untuk bahan evaluasi peningkatan pencapaian sasaran program/kegiatan di tahun anggaran berikutnya.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih dengan



harapan semoga segala upaya kita dalam rangka membangun Bumi Panji Sakti tercinta akan senantiasa mendapatkan tuntunan dan petunjuk Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa.

Om Santih, Santih, Santih Om.

Singaraja, April 2017

BUPATI BULELENG,

TTD

PUTU AGUS SURADNYANA,ST.



B. PENDAHULUAN

1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BULELENG

Secara geografis Kabupaten Buleleng terletak pada posisi $6^{\circ}03'40''$ - $8^{\circ}23'00''$



LS dan $114^{\circ}25'55''$ - $115^{\circ}27'28''$ BT; berada di belahan Utara Pulau Bali memanjang dari Barat ke Timur. Kondisi geografis

wilayah Kabupaten Buleleng cukup bervariasi, sebagian berupa daerah berbukit dan bergunung yang membentang di bagian Selatan, sedangkan di bagian Utara sepanjang pantai merupakan dataran rendah yang sempit dan kurang landai. Tipologi geografis yang demikian dikenal sebagai *Nyegara Gunung*, posisi yang cukup strategis menurut konsep Hindu yang menganut sistem hulu (*ulun*) dan hilir (*teben*). Kabupaten Buleleng memiliki potensi pembangunan berupa luas wilayah yang cukup besar, yaitu $1.365,88 \text{ Km}^2$ atau 24,25% dari luas Provinsi Bali, dengan batas-batas wilayah di Sebelah Barat Kabupaten Jembrana, Sebelah Utara Laut Bali, Sebelah Timur Kabupaten Karangasem dan di Sebelah Selatan Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung dan Bangli. Secara administrasi, wilayah Kabupaten Buleleng mencakup 9 (sembilan) kecamatan, 129 desa, 19 kelurahan, dan 169 Desa Pakraman.

Jumlah penduduk Kabupaten Buleleng pada Desember Tahun 2016 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tercatat sebanyak 811.923 orang yang terdiri dari 406.757 penduduk laki – laki dan 405.166 penduduk perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten Buleleng pada Tahun 2016 mencapai 594,44 orang /Km². Ini berarti bahwa dalam setiap kilometer persegi wilayah Kabupaten Buleleng dihuni kurang lebih 594 penduduk. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Buleleng dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 mengalami penurunan yang signifikan. Kurun waktu 2011-2012 pertumbuhannya mencapai 0,635, Tahun 2012-2013 tingkat pertumbuhan menurun dari pertumbuhan tahun sebelumnya yakni sebesar 0,631 dan pada Tahun 2013-2014 laju pertumbuhan mencapai 0,627. Berdasarkan data ***Buleleng Membangun 2016*** bahwa rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Buleleng pada Tahun 2015

sebesar 99,26 yang berarti dari setiap 100 orang penduduk perempuan di Kabupaten Buleleng terdapat sebanyak 99 orang penduduk laki – laki. Data Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng berdasarkan data penduduk Tahun 2015, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Buleleng sebesar 100,24. Jika mengacu pada Struktur Usia maka Penduduk Kabupaten Buleleng paling banyak berada pada struktur usia 10-14 Tahun dan 30-34 Tahun. Sekitar 70,977 jiwa atau sekitar 8,79 persen penduduk kabupaten Buleleng berada pada struktur usia 30-34 Tahun. Sedangkan pada Struktur Usia 10-14 Tahun penduduk kabupaten Buleleng sebanyak 69,997 jiwa atau 8,67 persen dari keseluruhan Penduduk Kabupaten Buleleng pada Tahun 2015. Berdasarkan tingkat pendidikan maka Penduduk Kabupaten Buleleng dapat dirinci sebagai berikut, belum bersekolah 190.095 jiwa, 56.189 jiwa tidak tamat SD, 277.683 duduk di jenjang Sekolah Dasar, 100.814 berada pada tingkatan pendidikan SMP. Pada jenjang pendidikan menengah, yakni pada tingkat SMA terdapat 145.897 jiwa dan pada jenjang pendidikan tinggi yaitu pada jenjang Diploma II ; 8.337 jiwa, Diploma III ; 7.017 jiwa, Strata I ; 20.336 jiwa Strata II ; 1.091 jiwa dan Strata III ; 139 jiwa. Jika dilihat dari jenis kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan maka komposisi Penduduk Kabupaten Buleleng pada Tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut : Penduduk yang belum bekerja berjumlah 214,655 jiwa, mengurus rumah tangga 74,307 jiwa, Mahasiswa / Pelajar sebanyak 107,031 jiwa, PNS sebanyak 13,077 jiwa dan sisanya bekerja pada sector lainnya.

Sebagai Kabupaten terluas di Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Buleleng dituntut untuk memiliki tingkat perekonomian yang tinggi yang dapat dilihat melalui pertumbuhan *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB). Bahkan dengan dicanangkannya Singaraja – Ibukota Kabupaten Buleleng, sebagai ikon Kota Pelajar di Provinsi Bali diharapkan menambah geliat perekonomian Kabupaten Buleleng yang saat ini menduduki posisi ketiga dalam mencatat tingkat PDRB di wilayah Provinsi Bali. Pada Tahun 2015 Kabupaten Buleleng mencatat angka PDRB sebesar 25,49 Triliun Rupiah. Nilai tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat mencapai 22,33 Triliun Rupiah. Sementara apabila kita melihat potret perekonomian Kabupaten Buleleng secara riil tanpa melihat pengaruh harga didalamnya, Kabupaten Buleleng mencatat angka PDRB Tahun 2015 sebesar 18,82 Triliun Rupiah. Angka ini juga mengalami peningkatan sebesar 6,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai angka 17,74 Triliun Rupiah. Ini



merupakan gambaran positif dalam upaya pembangunan ekonomi di Kabupaten Buleleng dalam kurun Tahun 2013 – 2015. Namun perlu diingat bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya focus dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi tetapi juga harus memperhatikan pemerataan pendapatan masyarakatnya.

1. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk melihat potensi sektoral suatu wilayah adalah struktur ekonomi. Struktur ekonomi adalah komposisi peranan masing – masing sector menurut lapangan usaha perekonomian. Streuktur ekonomi digunakan untuk mengetahui sejauh mana peranan masing – masing kategori dalam pembangunan ekonomi sehingga dapat dipetakan potensi dari wialayah tersebut. Salah satu indicator yang sering dipergunakan untuk mengamati struktur perekonomian adalah distribusi presentase dari nilai tambah bruto lapangan usaha. Tidak jauh berbeda dengan Kabupaten / Kota se- Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng juga memiliki karateristik sebagai wilayah agraris. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng meningkat dari tahun ke tahun. Selama tahun 2011-2015, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng cenderung mengalami peningkatan. Hingga puncaknya pada Tahun 2013 laju pertumbuhan mencapai 7,15 persen. Kemudian mengalami perlambatan pada Tahun 2014 yang mencatat laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,96 persen. Dan Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng mencapai 6,11 persen. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada Tahun 2015, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng lebih tinggi 0,7 poin dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang mencapai 6,04 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng pada Tahun 2015 didorong oleh kategori informasi dan komunikasi sebesar 9,81 persen. Kemudian diikuti oleh jasa pendidikan yang mencapai sebesar 9,09 persen. Sedangkan kotegori lainnya memiliki pertumbuhan dibawah 9 persen pada Tahun 2015. Bahkan terdapat satu kategori yang mengalami kontraksi yang cukup dalam pada Tahun 2015 yaitu pertambangan dan penggalian dengan kontraksi sebesar 7,70 persen. Hal ini disebabkan kareana Pemerintah Kabupaten Buleleng telah mengeluarkan larangan terhadap usaha – usaha penggalian pasir liar yang tidak memiliki ijin usaha. Sebagai Kabupaten terluas di Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Buleleng dituntut untuk memiliki tingkat perekonomian yang tinggi yang dapat dilihat melalui pertumbuhan Produc Domestic Regional Bruto (PDRB). Tercatat PDRB Kabupaten Buleleng pada Tahun 2015 sebesar 25,49 triliun rupiah. Angka ini cukup membanggakan mengingat PDRB yang terbentuk Tahun 2014 mencapai 22,33 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 3,16 triliun rupiah. Dengan total nilai yang telah



dicapai pada Tahun 2015, ternyata Kabupaten Buleleng mampu menyumbangkan 14,39 persen dari total PDRB yang terbentuk di Provinsi Bali. Sementara potret perekonomian Kabupaten Buleleng tanpa melihat pengaruh perubahan harga, Kabupaten Buleleng mencatat angka PDRB Tahun 2015 sebesar 18,82 triliun rupiah. Nilai ini juga mengalami peningkatan sebesar 6,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 17,74 triliun rupiah. Hal ini merupakan gambaran yang baik dalam upaya pembangunan ekonomi di Kabupaten Buleleng.

2. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2012 -2017 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2015

RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2012-2017 yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan kondisi umum daerah Kabupaten Buleleng saat ini, permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis, potensi Sumberdaya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2012-2017 dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Buleleng yakni :

” Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Damai Dan Lestari Berlandaskan Tri Hita Karana ”

Visi pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2012 – 2017 ini menjadi arah cita-cita pembangunan yang sistematis bagi penyelenggara pemerintah Kabupaten Buleleng dan segenap pemangku kepentingan. Arah menuju visi tersebut dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut:

1. Mandiri, diukur dengan:

- Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah yang berbasis kinerja.



- Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good and Clean Governance), yaitu profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN.
- Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna bagi masyarakat.
- Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan dan kemajuan pembangunan daerah.
- Meningkatnya partisipasi/swadaya masyarakat dalam memenuhi sendiri kebutuhan pokok.
- Terwujudnya pariwisata berbasis budaya dan keindahan alam yang unik, serta terbangunnya sinergitas dengan sektor pertanian.

2. Sejahtera, diukur dengan :

- Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditunjukkan oleh:
- Tingkat Pendidikan antara lain: terlaksananya wajib belajar 12 tahun, meningkatnya jumlah penduduk berpendidikan tinggi, menurunnya tingkat pendidikan terendah, meningkatnya angka partisipasi sekolah, dan tersedianya tenaga siap pakai melalui pendidikan kejuruan.
- Tingkat Kesehatan antara lain: meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, angka harapan hidup dan terpenuhinya sistem pelayanan sosial melalui Asuransi Kesehatan.
- Kemampuan daya beli masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya pendapatan riil per kapita.
- Berkurangnya jumlah penduduk miskin, pengangguran terbuka dan kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan sosial.
- Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, sanitasi, dan kesempatan berusaha).
- Berkembangnya keterpaduan antar sektor dalam pengelolaan potensi ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan.
- Tersedianya jaringan Infrastruktur yang mampu mendorong perekonomian perdesaan.

3. Damai, diukur dengan:

- Teraktualisasinya keragaman budaya lokal.
- Terjaminnya kebebasan beribadah.



- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan supremasi hukum.

4. Lestari, diukur dengan:

- Terkelolanya lingkungan hidup dan pemanfaatan SDA secara berkelanjutan.
- Terpeliharanya adat istiadat dan nilai-nilai budaya Bali sebagai pedoman di dalam kehidupan bermasyarakat.
- Terwujudnya lingkungan permukiman yang berlandaskan kearifan lokal.
- Terwujudnya penggunaan ruang dan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Buleleng untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Percepatan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi, merata dan berkualitas.
2. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah.
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas yang profesional, berbudaya dan bermoral.
4. Menumbuhkembangkan sinergi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan pembangunan.
5. Pelestarian budaya Bali yang ditumbuhkembangkan pada masyarakat.
6. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.
7. Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berkelanjutan (sustainable development).

Mengacu pada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik, maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan adalah:

1. Meningkatkan perekonomian daerah.
2. Meningkatkan daya saing daerah.
3. Meningkatkan daya beli masyarakat.
4. Meningkatkan produksi dan daya saing produk unggulan daerah.

5. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
6. Mewujudkan sinergi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan.
7. Lestarinya kebudayaan Bali yang adiluhung.
8. Mewujudkan keadilan di semua bidang pembangunan, dan
9. Mewujudkan pembangunan sesuai peruntukan ruang dan berwawasan lingkungan.

Sedangkan sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017, dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan.
2. Meningkatnya penanaman modal baik asing maupun dalam negeri.
3. Meningkatnya pendapatan masyarakat.
4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk unggulan daerah.
5. Meningkatnya daya saing produk-produk unggulan daerah di pasaran.
6. Terwujudnya struktur perekonomian yang tangguh berbasis unggulan daerah.
7. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.
8. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
9. Meningkatnya profesionalisme dan kemandirian Aparatur Pemerintah.
10. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
11. Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pembangunan.
12. Tumbuhnya rasa memiliki dikalangan pemangku kepentingan.
13. Meningkatnya peran pemangku kepentingan dalam pengendalian pembangunan.
14. Meningkatnya apresiasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal yang adiluhung.
15. Tumbuh dan berkembangnya kesenian berbasis budaya Bali.
16. Tegaknya supremasi hukum, ketentraman, dan keadilan disemua aspek kehidupan.
17. Terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan sosial.
18. Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan.
19. Terjaganya kualitas sumber daya alam.

- 20. Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan
- 21. Meningkatnya pemanfaatan sumber energi terbarukan.

Dengan penyampaian Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng ini, diharapkan masyarakat dapat melihat dan memahami gambaran pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng sesuai dengan prioritas umum pembangunan daerah selama Tahun Anggaran 2016. Selanjutnya melalui media ini disampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 dengan sistematika penyajian meliputi : ringkasan pelaksanaan urusan desentralisasi, ringkasan pelaksanaan tugas pembantuan dan ringkasan pelaksanaan tugas umum pemerintahan sebagai akumulasi atas seluruh kinerja pembangunan daerah Kabupaten Buleleng sampai dengan Tahun 2016.

C. RINGKASAN PELAKSANAAN URUSAN DESENTRALISASI

1. Keuangan Daerah.

1.1. Pendapatan Daerah.

Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng pada Tahun Anggaran 2016 dicapai melalui kontribusi pendapatan asli daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lain – lain pendapatan daerah yang sah. Tahun 2016 pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp. 2.066.054.109.742,38 dengan kontribusi tiga sumber pendapatan dimaksud meliputi :

1.1.1. Pendapatan Asli Daerah [PAD]).

Tahun 2016 pendapatan asli daerah terealisasi sebesar Rp. 282.111.205.871,44 dengan capaian 100,31 persen dari target yang direncanakan yang berjumlah sebesar Rp. 281.216.000.000,00. Pencapaian kinerja pendapatan daerah yang bersumber dari PAD tercapai dari kontribusi Pajak daerah yang terealisasi sebesar 102.239.556.549,13, Retribusi Daerah sebesar Rp. 15.126.587.042,00. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 15.030.436.696,73 dan Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah yang terealisasi sebesar Rp. 149.714.625.583,58.



1.1.2. Pendapatan Transfer.

Tahun 2016 Dana Perimbangan terserap sebesar Rp. 1.305.606.678.444,00, realisasi ini tercapai 90,04 persen dari target yang direncanakan yakni sebesar Rp. 1.449.970.563.193,00. Realisasi dana perimbangan meliputi realisasi Bagi hasil pajak sebesar Rp. 29.020.239.685,00, realisasi bagi hasil bukan pajak / sumber daya alam sebesar Rp.3.982.580.491,00, realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 982.698.080.000,00 dan Dana Alokasi khusus yang terealisasi sebesar Rp. 293.888.358.759,00. Selanjutnya pendapatan transfer yang bersumber dari transfer pemerintah pusat lainnya berupa dana penyesuaian dengan realisasi sebesar Rp. 246.094.937.832,28 dan dana transfer daerah lainnya dalam bentuk pendapatan bagi hasil pajak yang terealisasi sebesar Rp. 204.521.694.024,66, serta bantuan keuangan pada Tahun 2016 yang terealisasi sebesar Rp. 27.611.028.570,00.

1.1.3. Lain – lain pendapatan daerah yang sah.

Lain – lain pendapatan daerah yang sah meliputi dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya yang terealisasi Rp. 204.521.694.024,66, Dana penyesuaian dan otonomi khusus terealisasi Rp. 246.094.937.832,28 dan bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya Rp. 27.611.028.570,00.

1.2. Belanja Daerah.

Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 2.200.355.657.347,43 atau 92,66 persen dari target yang direncanakan yakni sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23. Pencapaian kinerja tersebut sebagai langkah efisiensi penggunaan anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran 2016, yang tercermin dari realisasi belanja daerah sebagai berikut : **(1). belanja operasi** sebesar Rp. 1.468.715.415.221,31 atau 93,04 persen dari target yang direncanakan yakni sebesar Rp.

1.578.614.721.967,66. Realisasi belanja operasi meliputi : realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 920.196.600.844, Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 470.594.635.567,31, Belanja Hibah sebesar Rp. 72.754.917.810,00 Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp. 5.169.261.000,00.

(2). Belanja Modal sebesar Rp. 346.069.287.645,96 atau tercapai 84,89 persen dari anggaran yang direncanakan yakni sebesar Rp. 407.652.232.494,70. **(3). Belanja Tak Terduga**, realisasi belanja tak terduga pada Tahun 2016 sebesar Rp. 1.186.655.048,90.

1.3. Pembiayaan.

Kinerja pembiayaan daerah tercapai sebesar Rp. 162.928.843.959,34 atau 102,84 persen dari target pembiayaan daerah tahun 2015. Capaian kinerja pembiayaan daerah berasal dari kontribusi capaian kinerja pembiayaan penerimaan daerah yang terealisasi sebesar Rp. 163.028.843.959,34, berbanding jumlah pembiayaan pengeluaran daerah sebesar Rp. 100.000.000,00. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran [SILPA] pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 28.627.296.354,29.

Komposisi Belanja Daerah pada tahun 2016 sebagian besar masih digunakan untuk Belanja Aparatur/Belanja Pegawai yaitu sebesar Rp. 961.075.607.179,00 atau mencapai 43,67 persen dari total jumlah Belanja Daerah Kabupaten Buleleng. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga didukung oleh proporsi belanja pelayanan dasar dalam APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2016 yang mencapai 60,53 persen. Pelayanan dasar ini dimaksud sebagai pelayanan umum (public service) yang merupakan salah satu tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat baik melalui penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan dasar masyarakat pada bidang Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, Sosial, Tenaga Kerja, Koperasi, Sat Pol PP dan Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk Tahun Anggaran 2016 jumlah belanja dasar sebesar Rp. 1.331.953.665.200,68 dari total belanja APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2016 yang berjumlah sebesar Rp. 2.200.355.657.347,43. Anggaran belanja untuk Urusan Pendidikan dialokasikan dengan anggaran Rp.965.076.099.504,19 dan urusan kesehatan Rp. 171.433.968.285,49.

1.4. Alokasi dan Realisasi Belanja Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Alokasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 untuk pembiayaan penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan berjumlah sebesar Rp.2.374.587.023.431,23 dan terealisasi sebesar Rp. 2.200.355.657.347,43 atau mencapai 92,66 persen.

1.4.1. Alokasi dan Realisasi Belanja Urusan Wajib dan Pilihan Dalam Struktur APBD Tahun 2016

No	Urusan Wajib dan Pilihan	Belanja		%
		Anggaran	Realisasi	
Urusan Wajib				
1	Pendidikan	965.076.099.504,19	892.560.927.787,06	92,49
2	Kesehatan	390.501.991.807,98	236.810.492.961,39	60,64
3	Pekerjaan Umum	191.311.696.786,17	154.297.568.368,00	80,65
4	Perumahan	99.439.261	89.510.000	90,01
5	Penataan Ruang	62.581.700	59.058.950	94,37
6	Perencanaan Pembangunan	15.331.903.710,75	14.893.270.827,00	97,14
7	Perhubungan	14.306.198.504,00	14.213.198.365,00	99,35
8	Lingkungan Hidup	38.308.806.000,00	34.252.216.388,00	89,41
9	Pertanahan	-	-	-
10	Kependudukan dan Catatan Sipil	7.317.070.100,00	7.248.646.622,00	99,06
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	521.319.385	466.153.243	89,41
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	10.403.640.426,58	9.774.407.634,00	93,95
13	Sosial	22.460.781.380,00	22.326.121.697,00	99,40
14	Tenaga Kerja	8.403.691.870,00	8.099.799.824,00	96,38
15	Koperasi dan UKM	23.073.816.291,00	21.038.662.476,00	91,18
16	Penanaman Modal	4.512.524.170	4.396.371.797	97,43
17	Kebudayaan	20.886.154.173,85	20.143.124.263,00	96,44
18	Pemuda dan Olah raga	5.657.792.925	4.917.446.909	86,91
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	4.990.732.000,00	4.879.177.744,00	97,76
20	Otonomi Daerah	251.575.856.569,59	238.665.031.681,7	94,86
21	Ketahanan Pangan	1.303.259.346	1.247.469.965	95,72
22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.459.043.168,26	7.372.071.886,00	98,83
23	Statistik	-	-	-
24	Kearsipan	99.699.830	95.467.471	95,75
25	Komunikasi dan Informatika	7.196.692.000,00	7.093.365.483,00	98,56
26	Perpustakaan	2.783.224.116,25	2.746.611.531,00	98,68
Urusan Pilihan				
1	Pertanian	26.255.198.818,57	25.635.028.482,00	97,64
2	Kehutanan	13.805.518.647,89	11.792.891.863,00	85,42
3	Energi dan SDM	22.162.776.989	21.298.564.058	96,10
4	Pariwisata		3.325.384.983	-
5	Perikanan	11.379.191.816,95	10.898.484.306,00	95,78
6	Perdagangan	15.696.291.615	11.224.558.610	71,51
7	Perindustrian	388.795.300	305.958.500	79,86
8	Transmigrasi	174.040.935	161.164.600	92,60

1.5. SKPD Pelaksana Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

1.5.1 Urusan Wajib.

No	SKPD	Urusan Wajib
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng	Otonomi Daerah
2	Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng	Otonomi Daerah
3	Inspektorat Kabupaten Buleleng	Otonomi Daerah
4	Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng	Pendidikan
		Pemuda dan Olah Raga
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng	Kesehatan
6	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Sosial
7	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng	Komunikasi dan Informatika
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng	Kebudayaan
9	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng	Lingkungan Hidup
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng	Kependudukan dan Capil
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng	Tenaga Kerja
12	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng	Koperasi dan UKM
13	Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng	Otonomi Daerah
14	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng	Pekerjaan Umum
		Tata Ruang
		Perumahan
15	Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng	Perhubungan
16	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng	Ketahanan Pangan
17	Badan Kepegawaian Daerah	Otonomi Daerah
18	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	Pemberdayaan Masyarakat
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan
20	Badan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Otonomi Daerah
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Otonomi Daerah
24	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	Penanaman Modal
25	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Keluarga Berencana
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
26	RSUD	Kesehatan
27	Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah Kabupaten Buleleng	Perpustakaan
		Kearsipan
28	Satuan Polisi Pamong Praja	Pemerintahan Umum
29	Kecamatan Gerokgak	Pemerintahan Umum

30	Kecamatan Seririt	Pemerintahan Umum
31	Kecamatan Busungbiu	Pemerintahan Umum
32	Kecamatan Banjar	Pemerintahan Umum
33	Kecamatan Buleleng	Pemerintahan Umum
34	Kecamatan Sukasada	Pemerintahan Umum
35	Kecamatan Sawan	Pemerintahan Umum
36	Kecamatan Kubutambahan	Pemerintahan Umum
37	Kecamatan Tejakula	Pemerintahan Umum

1.5.2 Urusan Pilihan.

No	SKPD	Urusan Wajib
1	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Buleleng	Perikanan
2	Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Buleleng	Pertanian
3	Dinas Kehutanan Kab. Buleleng	Kehutanan
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Buleleng	Pariwisata
5	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Buleleng	Perdagangan
		Industri
6	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buleleng	Energi Sumber Daya Mineral
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Buleleng	Transmigrasi

1.6. Aparatur Pemerintah Daerah.

Tahun 2016 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Buleleng berjumlah 9.912 orang. Dinas Pendidikan merupakan SKPD dengan jumlah pegawai terbesar yang berjumlah 6.257 orang, termasuk didalamnya Guru TK, Guru SD, Guru SMP, Guru SMA dan Guru SMK. Selanjutnya berturut – turut SKPD dengan jumlah PNS terbanyak ; Dinas Kesehatan dengan jumlah pegawai yang berstatus PNS sebanyak 736 orang termasuk tenaga kesehatan di 20 Puskesmas se- Kabupaten Buleleng. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dengan jumlah pegawai (PNS) 523 orang, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng 198 orang, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng dengan jumlah PNS 157 orang, Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng 138 orang.

Dari keseluruhan jumlah PNS Kabupaten Buleleng Tahun 2016 PNS Fungsional yang ada meliputi : Guru TK berjumlah ; 161 orang, guru sekolah dasar (SD) ; 3.164 orang, Guru SMP ; 1.311 orang, Guru SMA ; 709 orang, Guru SMK ; 547 orang. Selanjutnya Administrator Kesehatan Muda 1 orang, Ajun Pamong Belajar 13 orang, Apoteker Madya 5 orang,



Asisten Apoteker 16 orang, Arsiparis 9 orang, Asisten Apoteker 16 orang, Auditor 5 orang, Bidan 231 orang, Dokter Gigi 14 orang, Dokter 66 orang, Fisioterapis 2 orang, Nutrionis 37 orang, Penyuluh Pertanian 46 orang, Penyuluh KB 21 orang, Penyuluh Kehutanan 16 orang, Penyuluh Perindustrian 3 orang, Perekam Medis 1 orang, Pranata Laboratorium 6 orang, Radiografer 2 orang, Sanitarian 47 orang, pengadaan barang dan jasa 7 orang.

Berdasarkan pangkat dan golongan komposisi PNS Kabupaten Buleleng Tahun 2016 adalah ; Pembina Utama (IV/e) ; 2 orang, Pembina Utama Madya (IV/d) ; 5 orang, Pembina Utama Muda (IV/c) ; 37 orang, Pembina Tk.I (IV/b) ; 377 orang, Pembina (IV/a) ; 3.545 orang, Penata Tk.I (III/d) ; 1.093 orang, Penata (III/c) ; 902 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) ; 1.270 orang, Penata Muda (III/a) ; 767 orang, Pengatur Tk.I (II/d) ; 303 orang, Pengatur (II/c) ; 694 orang, Pengatur Muda Tk.I ; 448, Pengatur Muda (II/a) ; 316 orang, Juru Tk.I (I/d) ; 40 orang, Juru (I/c) ; 74 orang, Juru Muda Tk.I (I/b) ; 23 orang dan Juru Muda (I/a) ; 16 orang.

Eselonering yang terisi dari jabatan yang tersedia pada seluruh SKPD Tahun 2015 berjumlah 889 jabatan yang meliputi ; Pejabat Eselon II.A ; 1 orang, Eselon II.B ; 34 orang, Eselon III. A ; 53 orang, Eselon III.B ; 108 orang, Eselon IV.A ; 483 orang, Eselon IV.B ; 161 orang, Eselon V.A; 49 orang.

2. Kinerja Urusan Pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 26 [dua puluh enam] Urusan Wajib dan 8 [delapan] Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kabupaten Buleleng telah mengimplementasikan seluruh urusan tersebut melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Buleleng pada Tahun 2016 juga tercermin dari capaian Indikator Kinerja Kunci pada Tataran

Pengambil Kebijakan dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, yang meliputi :

1) Indikator Kinerja Kunci pada Tataran Pengambil Kebijakan.

- a. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah.
- 1. Fokus Peraturan tentang ketertiban dan penataan ruang.

1.1 IKK Keberadaan Perda IMB.

Ketentraman dan ketertiban merupakan syarat mutlak dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tentram dan tertib secara umum akan terwujud apabila adanya dukungan berbagai komponen masyarakat dan aparatur terkait guna mendukung akselerasi pembangunan daerah. Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan adanya peraturan – peraturan sebagai produk hukum daerah yang nantinya mengatur dan membatasi penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tercakup dalam aspek tersebut adalah Peraturan Daerah mengenai penataan ruang. Penataan ruang sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 merupakan urusan strategis yang menyangkut pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang ada (RTRWK, RDTR, RTBL) sehingga pemanfaatan ruang oleh semua pihak perlu dikendalikan. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menjabarkan kebijakan ini melalui penerbitan IMB sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat yang dalam hal ini berhubungan dengan kegiatan penataan bangunan – bangunan yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan. Penerbitan Peraturan daerah ini adalah langkah nyata pencapaian sasaran penyelenggaraan urusan Penataan Ruang yaitu terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang dijabarkan melalui Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, program ini dilaksanakan untuk mewujudkan pengendalian dan pemanfaatan ruang. Perkembangan jumlah Ijin Mendirikan Bangunan menjadi hal yang sangat penting dalam penataan ruang. Program ini dilaksanakan untuk mewujudkan pengendalian dan pemanfaatan ruang.

1.2 IKK Rasio Rumah Ber IMB.

Adanya peralihan kewenangan pemberian ijin IMB yang semula dilaksanakan oleh Dinas PU Kabupaten Buleleng namun kini ditangani oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng meningkatkan efektifitas pelayanan. Rentang Tahun 2008 - 2016 rumah yang memiliki Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Buleleng mencapai 12.310 rumah. Dari perhitungan terakhir jumlah rumah di Kabupaten Buleleng adalah 171.218 rumah, sehingga rasio rumah ber-IMB mencapai 7,18 persen.

1.3 IKK Keberadaan PERDA RTRW,

Untuk pengaturan tata ruang wilayah di Kabupaten Buleleng tahun 2015 telah berpedoman pada PERDA RTRW Nomor 9 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2015 – 2033.

2. Fokus Peraturan Tentang Kependudukan,

2.1 IKK Pengurusan E- KTP,

Bagian yang tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum adalah tertib administrasi kependudukan. Begitu banyaknya masalah yang terjadi sebagai akibat belum tertatanya tertib administrasi kependudukan. Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka mengantisipasi persoalan yang timbul dari masalah kependudukan telah mengesahkan Peraturan Daerah tentang kependudukan sebagai mana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016. Tertibnya administrasi kependudukan juga tidak terlepas dari ketepatan pelayanan aparatur dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka pelayanan E-KTP sebagai program baru kependudukan dari Pemerintah, maka sampai keadaan Desember 2016 data penduduk Kabupaten Buleleng yang sudah terekam E-KTP berjumlah 592.017 orang dari jumlah penduduk yang wajib ber-KTP yang berjumlah 593.142 orang atau tercapai 99,81 persen.

2.2 IKK Biaya KTP,

Untuk biaya pengurusan KTP di Kabupaten Buleleng sudah tidak dipungut biaya/ digratiskan sesuai dengan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2016.

3. Fokus Personil Sat Pol PP (Kebijakan Ketersediaan Aparat Trantibum), IKK Rasio Personil Sat Pol PP terhadap jumlah penduduk,

Selanjutnya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah peran Satuan Polisi Pamong Praja sangat vital, karena diperlukan tindakan – tindakan yang refesentatif terhadap pelanggaran peraturan daerah. Melihat luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Buleleng dirasakan bahwa diperlukan adanya penambahan terhadap jumlah personil Sat Pol PP yang ada saat ini. Sampai Tahun 2016 jumlah personil Sat pol PP (PNS)

Kabupaten Buleleng berjumlah 74 orang jika harus dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Buleleng sesuai data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng berjumlah sekitar 869.282 jiwa, sangatlah memungkinkan diperlukan penambahan personil. Dan hal ini akan menjadi perencanaan di Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan data rasio jumlah Sat Pol PP terhadap jumlah penduduk mencapai 0,85 per 10.000 penduduk. Untuk penambahan tenaga saat ini telah direkrut tenaga kontrak.

4. Fokus Kebijakan Bidang Penanganan PSK, PKL atau PMKS, IKK Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL atau PMKS,

Masalah PSK,PKL atau PMKS selalu menjadi kendala dalam rangka menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya aturan –aturan yang akan menjadi acuan dalam rangka meminimalisasi terhadap pelanggaran – pelanggaran yang disebabkan oleh PSK, PKL atau PMKS. Untuk mewujudkan rasa aman, tertib dan tentram pada masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh keberadaan PSK, PKL atau PMKS, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang PSK melalui Perda No. 6 Tahun 2009 tentang ketertiban umum dan Perda No. 7 Tahun 2009 yang mengatur tentang penanggulangan pelacuran.

5. Fokus Peraturan Tentang Kebersihan Kabupaten, IKK Keberadaan Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten,

Kebersihan lingkungan merupakan salah satu faktor pendukung sinerginya pelaksanaan pemerintahan daerah. Kabupaten Buleleng sebagai kabupaten terluas di Provinsi Bali berhasil dalam rangka mewujudkan penataan kebersihan wilayah melalui pengakuan pemerintah dengan Penghargaan Tropy Anugera Adipura Bhuana Tahun 2016. Mengacu pada keberhasilan yang telah dicapai tentunya tidak bisa dipisahkan dengan Kebijakan – Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam mengatur penataan kebersihan wilayah yang dituangkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 17 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan dan Perda No 1 Tahun 2013 tentang pengolahan persampahan.

- b. Aspek Keselarasan dan Efektifitas Hubungan Antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah, Serta Antara Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Pengembangan Otonomi Daerah.

6. Fokus Penyampaian Laporan Kepada Pemerintah.

IKK Ketepatan Waktu Penyampaian LPPD Berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007,

Dalam rangka keselarasan dan efektifitas hubungan antara Pemerintah dengan Pemerintah daerah maka penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah di dalam menyampaikan informasi pelaksanaan pemerintahan daerah kepada pemerintah. Laporan ini nantinya akan dipakai sebagai bahan evaluasi dan pembinaan lebih lanjut oleh pemerintah kepada pemerintah daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2016 disampaikan tepat pada waktunya pada tanggal 31 Maret 2016 sebagaimana tanda terima yang dilegalisir oleh Pemerintah Provinsi Bali.

7. Fokus Penyampaian laporan Keuangan dan Kinerja

IKK Ketepatan Penyampaian Laporan Kinerja dan Keuangan berdasarkan PP No. 8 tahun 2006.

Penyampaian laporan keuangan dan kinerja kepada pemerintah juga dinilai berdasarkan indikator ketepatan waktu penyampaian laporan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, adapun batas waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan kinerja adalah 2 (bulan) setelah tahun anggaran berakhir, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah memenuhi kewajiban tersebut dan menyampaikan laporan tepat waktu.

8. Fokus Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

IKK Urusan yang sudah diterapkan SPMnya berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah,

Sebagai penjabaran PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dari 26 urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, maka implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), diukur melalui indikator jumlah urusan wajib yang sudah ditetapkan SPM-nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Buleleng sampai tahun 2016 sudah menerapkan 15 SPM untuk pelaksanaan urusan wajib, namun belum ditetapkan baik dengan Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah.

9. Fokus Hubungan Antar Daerah.



IKK Kerjasama dengan daerah lain,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kerjasama maka Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Sub. Bagian Kerjasama yang dibentuk berdasarkan PP 41 Tahun 2007 telah melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah. MOU dengan daerah lain yang masih berlaku sampai dengan tahun 2016 yakni :

- MOU dengan Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Perjanjian Kerjasama Nomor : 075/20/KS/2012 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Buleleng Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali
- MOU dengan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah melalui perjanjian kerjasama Nomor: 075/11/KS/2013 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Tumbang Jutuh SP. 1 Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas
- MOU dengan Pemerintah Propinsi Bali melalui perjanjian kerjasama Nomor: 075/44/KS/2015 tentang Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM)
- MOU dengan Pemerintah Propinsi Bali dan Pemkab Jembrana melalui perjanjian kerjasama Nomor: 075/10/KS/2016 tentang Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Titab Propinsi Bali
- MOU dengan Pemerintah Propinsi Bali melalui perjanjian kerjasama Nomor: 075/14/KS/2016 tentang pembinaan
- MOU dengan Pemerintah Kabupaten Badung melalui perjanjian kerjasama Nomor: 075/17/KB/2016 tentang Distribusi dan Pemasaran Pangan di Kabupaten Badung
- MOU dengan Pemerintah Kabupaten Ngada melalui perjanjian kerjasama Nomor: 075/19/KS/2016 tentang Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Sektor Pertanian Pengembangan Usaha Tani Anggur Berbasis Manajemen dan Teknologi
- MOU dengan Pemerintah Propinsi Bali melalui perjanjian kerjasama Nomor: 075/28/KS/2016 tentang Pelaksanaan Pelayanan Penderita Tuberculosis Multi Drug Resistance (TB MDR) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng
- MOU dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju melalu perjanjian kerjasama Nomor: 075/30/KS/2016 tentang Transmigrasi (UPT) Sinyonyoi Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat

- MOU dengan Pemerintah Propinsi Bali melalui perjanjian kerjasama Nomor: 075/32/KS/2016 tentang Pembiayaan Penerima Peserta Bantuan Iuran (PBI) Daerah Program JKN-KIS.

c. Keselarasan Antara Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah

10. Fokus Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Pembangunan daerah,

IKK Kesesuaian Prioritas Pembangunan,

Sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2016 ditetapkan 11 prioritas pembangunan nasional dan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah maka kabupaten Buleleng sebagaimana dituangkan dalam RKPD Tahun 2016 melaksanakan 8 prioritas pembangunan yang sesuai dengan RKP Tahun 2016 atau 72,72 persen dari prioritas pembangunan nasional.

11. Fokus Kewenangan,

11.1 IKK Urusan Wajib yang diselenggarakan daerah,

Implementasi PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA terdapat 26 urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Untuk Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Buleleng melaksanakan 26 urusan wajib.

11.2 IKK Waktu Penetapan PERDA APBD,

ABPD Kabupaten Buleleng Tahun 2016 telah dituangkan dalam Ketetapan Perda No.11 tahun 2015 tentang APBD Th 2016. Batas penetapan APBD Tahun 2016 adalah 31 Desember 2015 sehingga Pemerintah Kabupaten Buleleng memenuhi ketepatan waktu penetapan APBD TA. 2016.

11.3 IKK Keberadaan Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP No 58 Tahun 2005,

Penjabaran terhadap PP No. 58 Tahun 2005 telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng.

12. Fokus Keuangan,

12.1 IKK Belanja Pelayanan Dasar,

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga didukung oleh perbandingan belanja pelayanan dasar dengan APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2016 yang mencapai 60,53 persen. Pelayanan dasar ini dimaksud sebagai pelayanan umum (public service) yang merupakan salah satu tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat baik melalui penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan dasar masyarakat pada bidang Pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, sosial, tenaga kerja, koperasi, sat pol pp dan kependudukan dan catatan sipil. Untuk Tahun Anggaran 2016 jumlah belanja dasar sebesar Rp. 1.331.953.665.200,68 dan total Belanja APBD Kabupaten Buleleng tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.200.355.657.347,43 sehingga belanja pelayanan dasar mencapai 60,53 persen dari total belanja APBD TA. 2016.

12.2 IKK Belanja Untuk Urusan Pendidikan dan Kesehatan,

Sedangkan perbandingan total belanja urusan pendidikan dan kesehatan dengan total belanja APBD mencapai 51,65 persen. Total Belanja Urusan Pendidikan dan Kesehatan pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.136.510.067.789,68

13. Fokus Pelayanan Publik,

IKK Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan,

Sampai saat ini Kabupaten Buleleng belum menetapkan PERDA mengenai standar pelayanan publik, namun dalam rangka pelayanan kepada masyarakat diupayakan untuk selalu menjaga kualitas dan kuantitas pelayanan yang prima dengan penetapan Peraturan Bupati tentang SOP Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Buleleng.

14. Fokus Kepegawaian.

14.1 IKK Ratio PNS terhadap penduduk,

Rasio Pegawai Negeri Sipil dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Buleleng mencapai 0,01 persen. Hal ini berdasarkan data bahwa jumlah PNS di Kabupaten Buleleng sampai dengan Tahun 2016 mencapai 9.912 orang. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2016 berjumlah 869.282 jiwa.

14.2 IKK Sistem Informasi Kepegawaian,



Dalam rangka penataan kepegawaian daerah, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng telah membuat Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Kabupaten Buleleng yang memuat data seluruh aparatur pemerintahan yang ada di Kabupaten Buleleng.

15. Fokus Kelembagaan

IKK Penataan SKPD,

Sebagaimana yang diamanatkan PP No 41 Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menyusun Organisasi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah beserta tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini dituangkan dalam PERDA No. 11 Th. 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah kabupaten Buleleng yang terdiri atas : Sekretariat Daerah dengan 7 Bagian, Sekretariat DPRD , Inspektorat, 15 Dinas Daerah , 9 Badan, 1 Kantor, Sat Pol PP, RSUD, dan 9 Kecamatan. Jadi Satuan Kerja Perangkat Kerja Kabupaten Buleleng berjumlah 39 unit.

d. Aspek Efektifitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah Dan DPRD.

16. Fokus Produk Peraturan Perundang – Undangan,

IKK PERDA yang ditetapkan,

Pemerintah daerah dan DPRD merupakan mitra yang mempunyai kedudukan sejajar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Peraturan daerah sebagai produk hukum daerah merupakan bukti kemitran eksekutif dan legislatif. Dimana dalam legitimasinya merupakan hasil sinkronisasi kebijakan antara keduanya. Tahun 2016 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng yang ditetapkan berjumlah 11 PERDA yang meliputi :

- 1) Perda Kab. Buleleng No. 1 Th. 2016 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
- 2) Perda Kab. Buleleng No. 2 Th. 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 3) Perda Kab. Buleleng No. 3 Th. 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

- 4) Perda Kab. Buleleng No. 4 Th. 2016 tentang Perlindungan Anak
- 5) Perda Kab. Buleleng No. 5 Th. 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- 6) Perda Kab. Buleleng No. 8 Th. 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
- 7) Perda Kab. Buleleng No. 9 Th. 2016 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol
- 8) Perda Kab. Buleleng No. 10 Th. 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa
- 9) Perda Kab. Buleleng No. 11 Th. 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penertiban Penebangan Pohon dan Bambu di Luar Kawasan Hutan
- 10) Perda Kab. Buleleng No. 12 Th. 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- 11) Perda Kab. Buleleng Nomor 13 Th. 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

17. Fokus Ranperda yang diajukan tahun berjalan.

IKK Ranperda yang disetujui DPRD Tahun 2016,

Ranperda yang disetujui DPRD dalam tahun 2016 tercapai 100 persen, karena dari 7 Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan tahun berjalan seluruhnya disetujui oleh DPRD. Ranperda yang disetujui meliputi :

1. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Perlindungan Anak
2. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa
4. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penertiban Penebangan Pohon dan Bambu di Kawasan Hutan
5. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

6. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

7. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak

e. Efektifitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh DPRD Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan.

18. Fokus Keputusan DPRD Yang ditindak lanjuti,
IKK Keputusan DPRD yang ditindak lanjuti

Tahun 2016 dari 17 Keputusan yang dihasilkan DPRD semuanya atau 100 persen ditindak lanjuti sebagai penjabaran fungsi DPRD terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah.

f. Aspek Efektifitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh Kepala Daerah Beserta Tindak Lanjut Hasil Keputusan.

19. Fokus Tindak Lanjut Keputusan Bupati,
IKK Keputusan Bupati Yang Ditindaklanjuti,

Keputusan Kepala Daerah adalah produk hukum yang mengatur tatanan kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di dalamnya terkandung muatan hukum yang mengatur jalannya roda pemerintahan daerah yang bersinergi dan selalu berlandaskan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tahun 2016 dalam proses pengambilan keputusan oleh Bupati sebagai kepala daerah menghasilkan 818 keputusan yang semuanya (100 %) telah ditindak lanjuti.

20. Fokus Tindak Lanjut Peraturan Bupati.

IKK Peraturan Bupati yang Ditindak lanjuti,

Peraturan Bupati yang juga merupakan dasar kebijakan – kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Buleleng pada tahun 2016 berjumlah 81 Peraturan Bupati. Dan semua telah ditindak lanjuti.

g. Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Pada Peraturan Perundang – Undangan

21. Fokus Perda yang Dibatalkan.

IKK Jumlah Perda Yang Dibatalkan,

Tidak ada PERDA yang dibatalkan dalam Tahun 2016.

h. Intensitas dan efektifitas Proses Konsultasi Publik Antara Pemerintahan Daerah dengan masyarakat Atas Penetapan Kebijakan Publik Yang

Setrategis dan relevan Untuk daerah.

22. Fokus Perda tentang Konsultasi Publik.

IKK Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik,

Sampai tahun 2016 belum ditetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang konsultasi publik. Namun dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah dan penyusunan rancangan peraturan daerah telah dilaksanakan melalui konsultasi publik.

23. Fokus Media Informasi pemda yang dapat diakses publik

IKK Adanya media informasi Pemda yang dapat diakses oleh publik (website kabupaten, pos , bag/ giro humas, leaflet/brosur),

Informasi terkini tentang jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Buleleng untuk Tahun 2016 dapat diakses melalui media informasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah baik melalui website www.bulelengkab.go.id maupun dari majalah Singa Manggala, Tabloid Kabar Buleleng serta Majalah Dimensi Buleleng.

i. Aspek Transparansi Dalam Pemanfaatan Alokasi Pencairan dan Penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil.

24. Fokus Serapan Dana Perimbangan.

IKK Dana Perimbangan yang diserap dibanding yang direncanakan,

Penyerapan dana perimbangan dari pusat oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 tercapai 90,04 persen dari target yang direncanakan. Dimana penyerapan dana perimbangan yang ditargetkan Rp. 1.449.970.563.193 realisasinya Rp. 1.305.606.678.444

25. Fokus Alokasi Belanja APBD dari DAU.

IKK Belanja Publik terhadap DAU,

Proporsi Belanja Publik dalam APBD Kabupaten Buleleng terhadap Dana Alokasi Umum mencapai 94,23 persen. Hal ini tercermin melalui Belanja Publik yang berjumlah Rp. 926.008.941.682,38 dan Dana Alokasi Umum yang berjumlah Rp. 982.698.080.000,-

26. Fokus Alokasi Belanja pada APBD.

IKK Belanja Langsung terhadap total APBD,

Perbandingan Belanja Langsung dalam APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2016 mencapai 42,08 persen. Belanja langsung dialokasikan sebesar Rp. 926.008.941.682,38 dari Total Belanja APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2016 yang besarnya Rp. 2.200.355.657.347,43,-



j. Aspek Intensitas, Efektifitas dan Transparansi Pemungutan Sumber – Sumber PAD dan Pinjaman /Obligasi Daerah

27. Fokus Besaran Pendapatan Asli Daerah.

IKK Besaran PAD terhadap seluruh Pendapatan dalam APBD (realisasi),

Tahun 2016 PAD Kabupaten Buleleng sebesar Rp. 282.111.205.871,44 atau mencapai 13,65 persen dari total pendapatan (realisasi) dalam APBD Kabupaten Buleleng yang berjumlah Rp. 2.066.054.109.742,38

k. Aspek Efektifitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggung Jawaban Dan Pengawasan APBD.

28. Fokus Kewajaran Laporan Keuangan.

IKK Opini BPK terhadap Laporan Keuangan,

Untuk tahun 2014 berdasarkan hasil audit Tim BPK di Kabupaten Buleleng terhadap efektifitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan APBD kewajaran laporan keuangan daerah adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Demikian juga tahun 2015 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

29. Fokus Besaran Silpa.

IKK Rasio Silpa terhadap total pendapatan,

Besaran silpa dalam APBD Kabupaten Buleleng dalam Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 28.627.296.354,29 atau 1,38 persen dari total pendapatan daerah yang terealisasi sebesar Rp. 2.066.054.109.742,38

30. Fokus Realisasi Belanja.

IKK Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja,

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Buleleng yang direncanakan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23 terealisasi sebesar Rp. 2.200.355.657.347,43 atau mencapai 92,66 persen.

31. Fokus Pengawasan Inspektorat Kabupaten.

IKK Rasio temuan BPK RI yang ditindak lanjuti,

Sampai dengan akhir tahun 2016 jumlah temuan BPK RI atas efektifitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan APBD Kabupaten Buleleng berjumlah 1.222 rekomendasi dan yang sudah ditindak lanjuti sampai akhir tahun 2016 adalah 994 rekomendasi atau 81,34 persen.

l. Aspek Pengelolaan Potensi Daerah.



32. Fokus Peta Potensi daerah.

IKK Rasio realisasi PAD 2016 terhadap potensi PAD,

Potensi PAD pada APBD tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 281.216.000.000 dan Realisasi PAD Kabupaten Buleleng Tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 282.111.205.871,44 Sehingga rasio realisasi PAD 2016 terhadap potensi PAD mencapai 100,31 persen.

33. Fokus Peningkatan PAD.

IKK Peningkatan PAD,

PAD untuk Tahun Anggaran 2016 realisasinya mengalami penurunan terhadap PAD tahun sebelumnya yaitu mencapai -3,70 persen, dimana realisasi PAD untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 282.111.205.871,44 dibandingkan realisasi PAD Tahun Anggaran 2015 yang mencapai Rp. 292.976.512.018,40.

m. Aspek terobosan / inovasi baru Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

34. Fokus Penghargaan.

IKK Penghargaan dari Pemerintah yang diterima pemerintah Daerah dalam tahun 2016,

Penghargaan yang diterima dari pemerintah sebagai pengakuan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dalam tahun 2015 meliputi:

1. Penghargaan **BKN Award** Predikat Terbaik I kategori **Implementasi Assessment Center** Tingkat Kabupaten/ Kota tahun 2016
2. Piagam Penghargaan Opini "**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**" dari BPK RI atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015
3. Penghargaan Anugerah Adipura Buana
4. Penghargaan **Kalpataru** kategori pengabdian Lingkungan Hidup (diraih/diterima oleh Petugas Penyuluh di Dishutbun atas nama Neneng Anengsih).
5. Penghargaan **Narwasita Tantra Award** Tahun 2016 Tingkat Kabupaten sebagai juara I.
6. Penghargaan **Manggala Karya Kencana** dalam bidang kependudukan dan pembangunan keluarga.
7. Penghargaan **Prakerti Madya** sebagai juara harapan II dalam lomba Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan, indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tingkat Nasional.
8. Anugerah **Bunda PAUD Nasional** Tahun 2016.
9. Trophy **Wahana Tata Nugraha** Tahun 2016 kategori Lalu Lintas dan angkutan.
10. Trophy dan sertifikat **Gerakan Nasional Program Kampung Iklim**



(Proklamasi) Tahun 2016 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

11. **Anugerah Dana Rakca** Tahun 2016 dari Kementerian Keuangan
12. Penghargaan **Program Adiwiyata** Tingkat Nasional
13. Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI atas Prestasi dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 dengan predikat nilai B (Baik)

Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng tahun 2016 berjumlah 13 penghargaan.

35. Fokus Pengadaan Barang dan Jasa.

IKK Keberadaan E-procurement,

Proses pengadaan barang dan jasa yang telah menggunakan sistem e-procurement dimaksudkan untuk mendukung transparansi dalam melakukan lelang tender pekerjaan, karena semakin sedikitnya kesempatan untuk melakukan negosiasi antara panitia pengadaan dan peserta lelang tender. Sampai Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Buleleng sudah menggunakan sistem e-procurement.

36. Fokus Daya saing Daerah.

IKK Jumlah Persetujuan Investasi,

Daya saing daerah akan semakin terlihat dari banyaknya investasi yang berkembang di daerah. Meningkatnya investasi akan menciptakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2016 ijin investasi dengan nilai investasi > 200 juta yang mendapat rekomendasi berjumlah 156 ijin investasi, dengan nilai investasinya mencapai Rp. 1.042.070.243.000,-

2) Tataran Pelaksana Kebijakan pada Aspek Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Urusan Pilihan,

1. Urusan Wajib.

a. Urusan Pendidikan ;

Pembangunan bidang pendidikan sebagai landasan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pada Tahun 2016 oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui SKPD yang

melaksanakan kewenangan urusan pendidikan, dijabarkan melalui 15 program dengan 102 kegiatan. Kesesuaian program dengan program nasional yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebesar 80 persen, yang mengindikasikan bahwa dari 5 program nasional dalam RKP diakomodasikan dalam 4 program yang dilaksanakan oleh SKPD. Sebagai catatan bahwa 5 (lima) program nasional yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah untuk Urusan Pendidikan, yakni Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Alokasi dan realisasi belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan untuk pelaksanaan Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng Tahun 2016 terinci melalui alokasi belanja SKPD sebesar Rp. 965.076.099.504,19 atau 40,64 persen dari alokasi belanja dalam APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2016 yang berjumlah sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23. Realisasi belanja SKPD sebesar Rp. 892.560.927.787,06 atau sebesar 92,49 persen dari anggaran yang direncanakan. Dari total realisasi belanja SKPD terinci ; realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 26.710.880.561,07, realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 125.480.246.430,55, realisasi belanja modal Rp. 62.136.007.384,44. *Belanja daerah tersebut termasuk pembiayaan untuk pelaksanaan Urusan Pemuda dan Olah Raga.*

Indikator kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2016 :

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	73,21
2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	59,62
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	81,32
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	85,77
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	69,06
6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,40
7.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,47
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,16
9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA (%)
11	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	99,99
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	98,92
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	98,92
14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	88,32

b. Urusan Kesehatan,

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.

Kesesuaian Program yang dilaksanakan Tahun 2016 dengan Program Nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah mencapai 100 persen, dari 12 (dua belas) program dalam RKP, 12 program diakomodasikan melalui pelaksanaan program SKPD.

Alokasi dan realisasi Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng pada Tahun 2016 meliputi :

Alokasi Belanja SKPD pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 171.433.968.285,49 dan terealisasi sebesar Rp. 142.316.933.374,23 atau 83,02 persen. Total realisasi belanja SKPD meliputi realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 1.320.215.000,00 realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 45.178.281.112,98 realisasi belanja modal Rp. 46.936.984.752,25

2. RSUD Kabupaten Buleleng.

Pendapatan asli daerah yang berasal dari pendapatan BLUD pada Tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp. 115.500.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 117.821.469.180,67 atau tercapai 102,01 persen. Sedangkan belanja daerah pada Tahun 2016 dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 219.068.023.522,49 dan terealisasi Rp. 212.813.427.756,39 atau 97,14 persen. Realisasi belanja SKPD meliputi realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 10.800.000,00, realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 122.886.743.057,12, realisasi belanja modal sebesar Rp. 55.027.050.666,27

Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2016 :

- 1) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani, dengan capaian 69,65 persen, jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sebanyak 1.705 dibagi Jumlah

- ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama pada tahun 2016 sebanyak 2.448 orang.
- 2) Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan, dengan pencapaian 88,13 persen, hal ini ditunjukkan oleh jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sebanyak 10.294 berbanding dengan seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama sebanyak 11.681 orang.
 - 3) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI), dengan pencapaian sebesar 72,30 persen, dimana jumlah desa/kelurahan UCI 107 desa/kelurahan berbanding dengan jumlah seluruh desa / kelurahan di kabupaten Buleleng sebanyak 148 desa/kelurahan.
 - 4) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan, dengan pencapaian 100 persen, Tahun 2016 balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan Kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu di Kabupaten Buleleng berjumlah 175 orang dibagi dengan seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama yang berjumlah 175 orang.
 - 5) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC BTA +, dengan pencapaian sebesar 100 persen, ditunjukkan oleh indicator penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan di satu wilayah kerja selama 1 tahun sebanyak 185 orang dibagi Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yg sama yang berjumlah 185 orang.
 - 6) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD, dengan capaian sebesar 100 persen, indikatornya dari 3.737 penderita DBD yg ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 tahun dibagi 3.737 penderita DBD yg ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yg sama.
 - 7) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin, dengan capaian 0,39 persen, dengan indicator pada tahun 2016 terdapat 1.954 kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1 dibagi Jumlah seluruh miskin di Kabupaten Buleleng yang berjumlah 244.208 orang.
 - 8) Cakupan Kunjungan Bayi, dengan pencapaian sebesar 98,84 persen, dengan indicator 10.996 kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi 11.125 bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.

c. Urusan Lingkungan Hidup,

1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng.



Alokasi Belanja SKPD pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 35.603.995.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 31.568.084.151,00 atau 88,66 persen. Total realisasi belanja SKPD meliputi realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 1.151.469.000,00 realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 12.340.320.324,00, realisasi belanja modal Rp. 12.158.975.500,00.

2. Badan Lingkungan Hidup kabupaten Buleleng.

Alokasi Belanja SKPD pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 7.541.088.403,89 dan terealisasi sebesar Rp. 7.234.868.699,00 atau 95,94 persen. Total realisasi belanja SKPD meliputi realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 262.895.000,00, realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 3.075.571.162,00, realisasi belanja modal Rp. 1.212.270.300,00.

Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup pada Tahun 2016 meliputi :

- 1) Penanganan Sampah, tercapai 96,6 persen, hal ini ditunjukkan melalui indikator : Volume sampah yang ditangani tahun 2016: 281,05 M3 dibagi dengan Volume produksi sampah tahun 2016 yang berjumlah 290,94 M3
- 2) Kebersihan, 16,67 persen, hasil ini sebagai perbandingan jumlah pasar tradisional tergolong baik, 2 pasar dengan jumlah seluruh pasar tradisional, 12 pasar.
- 3) Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk, tercapai 0,07 persen. Angka pencapaian ini ditunjukkan melalui jumlah daya tampung TPS tahun 2016; 68 M3 dikali 1000 dibagi jumlah penduduk kabupaten Buleleng tahun 2016 yang berjumlah 869.282 jiwa.
- 4) Penegakan Hukum Lingkungan, tercapai 100 persen, Tahun 2016 di Kabupaten Buleleng kasus lingkungan yang terjadi sebanyak 5 kasus dan ditangani dan diselesaikan seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng.

d. Urusan Pekerjaan Umum,

Alokasi Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 191.311.696.786,17 dan terealisasi sebesar Rp. 154.297.568.386,00 atau 80,65 persen. Total realisasi belanja SKPD meliputi realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 1.005.355.000,00, realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 24.570.791.351,00, realisasi belanja modal Rp. 117.205.577.202,00. *Total realisasi belanja pada Dinas*

Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng juga termasuk realisasi belanja untuk Urusan Tata Ruang, Perumahan dan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum pada Tahun 2016 meliputi :

- 1) Panjang jalan kabupaten tahun 2016 dalam kondisi baik 786,937 Km2 dibagi panjang seluruh jalan kabupaten tahun 2016, 999,950 Km2 atau dengan tingkat capaian 78,69 persen.
- 2) Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik, 7.290 M2 dibagi dengan luas irigasi kabupaten 12.036 M2 atau 60,56 persen.
- 3) Rumah Tangga bersanitasi 12.892 dari total rumah tangga 159.757 atau 8,06 persen.
- 4) Luas kawasan kumuh mencapai 0,069 persen dari keseluruhan luas wilayah. Data kawasan kumuh pada Tahun 2016 mencapai 94,75 Ha.

e. Urusan Penataan Ruang,

Alokasi dan realisasi belanja pelaksanaan program dan kegiatan Urusan penataan ruang pada Dinas PU Kabupaten Buleleng Tahun 2016 terdiri atas belanja barang dan jasa yang dialokasikan sebesar Rp. 47.281.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 45.258.950,00 dan belanja pegawai yang dialokasikan Rp. 15.300.000,00 dan terealisasi Rp. 13.800.000,00

Capaian kinerja pelaksanaan urusan tata ruang ditunjukkan melalui indicator luas ruang terbuka hijau per satuan wilayah berHPL/HGU. Tahun 2016 data terkait luasan ruang terbuka hijau seluas 1.175,75 Ha dan luas wilayah berHPL/HGU seluas 2.790 Ha atau mencapai 42,14 persen. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng, dalam rangka pengembangan wilayah khususnya optimalisasi pengembangan wilayah budi daya termasuk didalamnya pengembangan kawasan Kawasan peruntukan lainnya, meliputi diantaranya kawasan peruntukan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang luasnya minimal 30% dari luas kawasan perkotaan.

f. Urusan Perencanaan Pembangunan,

Alokasi Belanja pada Bappeda Kabupaten Buleleng pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 15.331.903.710,75 dan terealisasi sebesar Rp. 14.893.270.827,00 atau 97,14 persen. Total realisasi belanja SKPD meliputi realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 2.445.630.000,00, realisasi belanja

barang dan jasa sebesar Rp. 8.294.735.258,00, realisasi belanja modal Rp. 193.740.000, Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan pada Tahun 2016 meliputi :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005 – 2025, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 15 Pebruari 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005 – 2025.
- 2) Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng 2012-2017 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 4 Tahun 2015 tentang RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017.
- 3) RKPD Tahun 2016 Ditetapkan dengan Peraturan Bupati Buleleng No. 21 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng tahun 2016.
- 4) Terdapat 436 program yang tercantum dalam RPJMD 2007-2015 dan telah dijabarkan dalam RKPD tahun 2016 melalui 88 program.

g. Urusan Perumahan,

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang penataan ruang pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 1 program dan 1 kegiatan, yaitu Program Pengembangan Perumahan dengan Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan masyarakat kurang mampu. Belanja Daerah untuk Urusan Perumahan meliputi belanja pegawai yang dialokasikan sebesar Rp. 6.000.000 yang terealisasi sebesar Rp. 4.485.000 dan belanja barang dan jasa dengan anggaran sebesar Rp. 93.439.261 dan terealisasi Rp. 85.025.000 Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Perumahan pada Tahun 2016 meliputi :

- 1) Rumah tangga pengguna air bersih mencapai 78,16 persen, yang merupakan hasil pembagian antara jumlah rumah tangga pengguna air bersih, 499.447 dengan jumlah seluruh rumah tangga di Kabupaten Buleleng pada tahun 2016, sejumlah 639.029.

- 2) Lingkungan pemukiman kumuh mencapai 0,07 dimana luas lingkungan pemukiman lingkungan kumuh pada Tahun 2016 mencapai 94,75 Ha dari total wilayah Kabupaten Buleleng yang luasnya 136.588 Ha.
- 3) Rumah layak huni mencapai 89,05 persen, sebagai perbandingan jumlah rumah layak huni yang mencapai 152.480 berbanding dengan jumlah rumah yang ada di Kabupaten Buleleng pada tahun 2016 yang berjumlah 171.218 Rumah.

h. Urusan Pemuda dan Olah Raga,

Alokasi dan realisasi belanja pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng Tahun 2016 terdiri atas belanja pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 214.225.000,- dan terealisasi Rp. 201.025.000,00, Belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp. 5.243.142.525,00 dan terealisasi Rp. 4.684.898.109,00 dan belanja modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.425.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 31.523.800,00.

Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olah Raga pada tahun 2016 meliputi :

- 1) Jumlah Gelanggang / Balai Remaja (selain milik swasta) dengan tingkat capaian 0,03 Per 1000 penduduk. Sampai Tahun 2016 terdapat 31 gelanggang olah raga milik Pemerintah Kabupaten yang memfasilitasi kebutuhan penduduk Kabupaten Buleleng yang berjumlah 869.282 jiwa.
- 2) Rasio Lapangan Olah Raga 0,47 Per 1000 Penduduk, dimana jumlah lapangan olah raga di kabupaten mencapai 411 lapangan dibagi jumlah penduduk, 869.282 jiwa dikali 1000.

i. Urusan Penanaman Modal,

Belanja Daerah pada BPPT Kabupaten Buleleng Tahun 2016 dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 4.512.524.174,00 dan terealisasi Rp. 4.396.371.797,00 atau 97,43 persen, yang terdiri atas Belanja Pegawai dengan terealisasi Rp. 313.529.000,00 Belanja Barang Dan Jasa dengan realisasi Rp. 1.628.455.292,00 dan belanja modal terealisasi Rp. 23.699.500,00.

Sementara itu pendapatan asli daerah pada BPPT Kabupaten Buleleng pada tahun 2016 terealisasi Rp. 6.516.130.500,00 atau terealisasi 113,05 persen dari target yang direncanakan sebesar Rp. 5.763.750.000,00.

Tahun 2016 pelaksanaan urusan penanaman mengalami penurunan nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 2016 yang mencapai -876,751 persen dibandingkan realisasi pada Tahun 2015. Nilai Realisasi PMDN tahun 2016 mencapai Rp. 1.028.190.243.000 sedangkan nilai realisasi PMDN Tahun 2015 Rp. 10.042.866.236.716.

j. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Capaian kinerja pelaksanaan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah ditunjukkan melalui indicator sebagai berikut :

1. Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Buleleng mencapai 59,06 persen yang didapat melalui pembagian jumlah koperasi yang aktif 189 dibagi jumlah seluruh koperasi 320 dikali seratus.
2. Jumlah usaha makro dan kecil sebanyak 6.012 dibagi seluruh jumlah UKM 9.981 di kali seratus sehingga hasilnya 60,23 persen.
3. Berdasarkan data Dinas Koperasi, Perdagangan dan Industri Kabupaten Buleleng pada tahun 2016 di kabupaten Buleleng terdapat 388 koperasi yang terdiri atas KUD 13 koperasi, KSU 170, KSP 74, KPN 43, KOPKAR 22, KOPTAN 21, Koperasi angkutan 2, Koperasi Wanita 9, Koperasi lainnya 33, dengan simpanan mencapai Rp. 61.377.586.501,00 Dan keanggotaan yang mencapai 66.518 anggota.
4. Perkembangan Keragaman UKM di Kabupaten Buleleng pada tahun 2016 mencapai 12.303 yang meliputi : pada bidang perdagangan berjumlah 7.785, industry pertanian 2.050, industry non pertanian 1.595 , aneka jasa 873.

k. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil,

Alokasi dan realisasi belanja langsung pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Tahun 2015 bersumber dari Belanja daerah yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 7.317.070.100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.248.646.622,00 dengan rincian Belanja Pegawai terealisasi Rp. 485.221.000,00, Belanja Barang dan Jasa terealisasi Rp. 3.523.864.479,00 serta Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 184.830.500,00.

Indikator capaian kinerja urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2016 meliputi :

- Penerbitan Kartu Keluarga (KK).

Sesuai dengan target SPM bahwa pada Tahun 2016 seluruh Kepala Keluarga wajib KK sudah memiliki Kartu Keluarga (KK). Pada Tahun 2016, dari wajib KK sebanyak 233.929 yang telah memiliki KK sebanyak 214.494 atau 91,70 persen. sehingga ada kesenjangan sebesar 8,30 persen yang harus dituntaskan.

- Penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el)

Sesuai dengan target SPM bahwa pada Tahun 2016 seluruh (100%) wajib KTP harus memiliki KTP elektronik. Sedangkan untuk penerbitan KTP sampai dengan tahun 2016, dari wajib KTP sebanyak 593.142 yang telah terlayani perekaman KTP elektronik sebanyak 592.017 atau 99,81 persen. sehingga ada kesenjangan sebesar 0,19 persen yang harus dituntaskan.

- Penerbitan Akta Kelahiran.

Sesuai dengan target SPM bahwa pada Tahun 2020 masyarakat yang memiliki akta kelahiran sebesar 90% dari jumlah masyarakat Kabupaten Buleleng. Sedangkan untuk penerbitan Akta Kelahiran dari jumlah penduduk sebanyak 869.282 jiwa yang telah memiliki akta sebanyak 38.531 atau 44,32 persen sehingga ada kesenjangan sebesar 55,68 persen yang harus dituntaskan sampai dengan tahun 2020.

I. Urusan Tenaga Kerja,

Alokasi dan realisasi belanja langsung pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng Tahun 2016 bersumber dari Belanja daerah yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 8.403.691.870,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.099.799.824,00 atau 96,38 persen, dengan rincian Belanja Pegawai terealisasi Rp. 491.575.000,00 Belanja Barang dan Jasa terealisasi Rp. 2.082.954.358,00, Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 90.645.000,00.

Sementara itu pendapatan asli daerah pada Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng pada tahun 2016 terealisasi Rp. 221.532.000,00 atau terealisasi 20,14 persen dari target yang direncanakan yang berjumlah sebesar sebesar Rp. 1.100.000.000,00.

Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Tenaga kerja pada Tahun 2016 meliputi :

- Prosentase tenaga kerja yang ditempatkan, dengan tingkat pencapaian 60 persen, sebagai hasil jumlah pekerja yang ditempatkan 374 orang dibagi 623 pekerja yang mendaftar.

- Pelayanan kepesertaan Jaminan sosial bagi pekerja / buruh mencapai 36,80 persen, dimana Jumlah pekerja / buruh peserta program jamsostek aktif 6.432 orang sedangkan jumlah pekerja / buruh 17.520 orang.

m. Urusan Ketahanan Pangan,

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 1.303.259.346,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.247.469.965 atau mencapai 95,72 persen. Ketersediaan pangan utama 175,60 ton , rata – rata ketersediaan pangan utama per tahun 137.000 ton/1000 penduduk. Struktur corak agraris yang dimiliki Kabupaten Buleleng yang menjadi andalan perekonomian disamping sektor lain di luar sektor pertanian, memperlihatkan bahwa produktifitas tanaman bahan pangan masih cukup tinggi.

n. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Alokasi dan realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Buleleng Tahun 2016 sebesar Rp. 521.319.385,00 dan terealisasi sebesar Rp. 466.153.243,00 atau mencapai 89, 41 persen.

Tingkat capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditunjukkan melalui indicator berikut :

- Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan, tercapai sebesar 42,16 persen, sebagai hasil pembagian jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintahan 4.237, dengan Jumlah Pekerja Perempuan 10.049.
- Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, sebesar 0,27 persen, jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 641 dibagi Jumlah Angkatan Kerja Perempuan 159.620.

o. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera,

Alokasi dan realisasi belanja langsung pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buleleng Tahun 2016 bersumber dari Belanja daerah yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 10.403.640.426,58 dan terealisasi sebesar Rp. 9.774.407.634,00 atau 93,95 persen, dengan rincian Belanja Pegawai

teralisasi Rp. 186.635.000,00, Belanja Barang dan Jasa terealisasi Rp. 4.235.910.606,00, Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 955.869.337,00. *Total Alokasi belanja daerah ini juga termasuk belanja untuk Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.*

Indikator Kinerja Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera :

1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (2,5%) ; Jumlah PUS yg istrinya berusia <20 th : 3.179 , Jumlah PUS yg istrinya berusia 15 - 49 th : 91.763
2. Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif 68,41% ; Jumlah peserta KB aktif : 62.770, Jumlah PUS : 191.760
3. Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) 20,88% ; Jumlah PUS tak ber KB : 19.161, Jumlah PUS 15 - 49 tahun: 91.763
4. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB 84,79% ; Jumlah Anggota BKB ber KB : 25.535, Jumlah PUS anggota BKB : 30.121
5. Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 82,84% ; Jumlah Anggota UPPKS ber KB : 1.768, Jumlah seluruh anggota UPPKS yang PUS : 2.134.
6. Ratio Petugas lapangan KB/Penyuluh KB / Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas disetiap 2 desa/ kelurahan ; Jumlah Desa / Kelurahan : 148, PLKB / PKB : 138.
7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan ; Jumlah Desa /Kelurahan : 148, Jumlah PPKBD Keterangan : 148.

p. Urusan Perhubungan,

Alokasi dan realisasi belanja langsung pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Tahun 2016 bersumber dari Belanja daerah yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 14.306.198.504,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.213.198.365,00 atau 99,35 persen, dengan rincian Belanja Pegawai terealisasi Rp. 767.760.000,00, Belanja Barang dan Jasa terealisasi Rp. 3.491.420.803,00, Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 1.930.551.450,00

Capaian kinerja urusan perhubungan ditunjukkan melalui indikator rasio angkutan darat 0,11 sebagai perbandingan jumlah angkutan darat 67.595 dengan jumlah penumpang angkutan darat yang berjumlah 606.104 orang.

q. Urusan Komunikasi dan Informatika,

Alokasi dan realisasi belanja langsung pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng Tahun 2016 bersumber dari Belanja daerah yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 7.196.692.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.093.365.483,00 atau 98,56 persen, dengan rincian Belanja Pegawai terealisasi Rp. 478.790.000,00, Belanja Barang dan Jasa terealisasi Rp. 2.924.921.691,00, Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 298.247.000,00.

Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informasi ditunjukkan melalui tersedianya Website milik pemerintah kabupaten, yaitu www.bulelengkab.go.id.

r. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri,

Alokasi dan realisasi belanja langsung pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng Tahun 2016 bersumber dari Belanja daerah yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 4.990.732.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.879.177.744,00 atau 97,76 persen, dengan rincian Belanja Pegawai terealisasi Rp. 397.000.000,00, Belanja Barang dan Jasa terealisasi Rp. 1.807.059.846,00, Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 133.479.500,00.

Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Tahun 2016 meliputi :

- Kegiatan Pembinaan Politik Daerah yakni jumlah pembinaan Politik Daerah yaitu Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik dan Kegiatan Penataan Atribut lainnya sebanyak 1 kegiatan.
- Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP yakni jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP yaitu Kegiatan Fasilitasi Ormas dan Kegiatan Kerjasama dengan Ormas dan Lembaga Nirlaba Lainnya sebanyak 1 kegiatan.

s. Urusan Otonomi Daerah,



Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan oleh SKPD berikut yaitu : Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas Pendapatan, BKD, BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kecamatan.

Alokasi dan realisasi belanja langsung pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Otonomi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 bersumber dari Belanja daerah yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 251.575.856.569,59 dan terealisasi sebesar Rp., 238.665.031.681,7 atau 94,86 persen.

Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah pada Tahun 2016 meliputi :

1. Peraturan Daerah yang ditetapkan pada Tahun 2016 mencapai 11 PERDA.
2. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) diajukan ke legislatif Tahun 2016 berjumlah 7 Ranperda.
3. Jumlah Keputusan Bupati dalam 1 (satu) tahun berjumlah 818 SK.
4. Jumlah Peraturan Bupati selama 1 (satu) tahun berjumlah 81 Perbup.
5. Penataan kelembagaan dan Perda Kelembagaan yang Diterbitkan 1 (satu) Perda yaitu Perda Kabupaten Buleleng Nomor 13 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
6. Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang dimiliki, SPM sebanyak 15 Bidang (Bidang Kesehatan, Sosial, Komunikasi dan Informasi, Ketahanan Pangan, Perhubungan, Pendidikan Dasar, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Lingkungan Hidup, Ketenagakerjaan, Pemerintahan Dalam Negeri, dan Kesenian)
7. Indeks Kepuasan Masyarakat, survey dilaksanakan di 10 SKPD (Dinas Pendapatan, BPPT, RSUD, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor Camat Buleleng, Kantor Camat Busungbiu, Kantor Camat Banjar, Dinas Pertanian dan Peternakan).
8. Jumlah temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2016 sejumlah 1.222 rekomendasi dengan temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2016 adalah 994 rekomendasi.

9. MOU dengan daerah lain yang masih berlaku sampai dengan tahun 2016 yakni :
- MOU dengan Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Perjanjian Kerjasama Nomor : 075/20/KS/2012 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Buleleng Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali
 - MOU dengan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah melalui perjanjian kerjasama Nomor: 075/11/KS/2013 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Tumbang Jutuh SP. 1 Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas
 - MOU dengan Pemerintah Propinsi Bali melalui perjanjian kerjasama Nomor: 075/44/KS/2015 tentang Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM)
 - MOU dengan Pemerintah Propinsi Bali dan Pemkab Jembrana melalui perjanjian kerjasama Nomor: 075/10/KS/2016 tentang Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Titab Propinsi Bali
 - MOU dengan Pemerintah Propinsi Bali melalui perjanjian kerjasama Nomor: 075/14/KS/2016 tentang pembinaan
 - MOU dengan Pemerintah Kabupaten Badung melalui perjanjian kerjasama Nomor: 075/17/KB/2016 tentang Distribusi dan Pemasaran Pangan di Kabupaten Badung
 - MOU dengan Pemerintah Kabupaten Ngada melalui perjanjian kerjasama Nomor: 075/19/KS/2016 tentang Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Sektor Pertanian Pengembangan Usaha Tani Anggur Berbasis Manajemen dan Teknologi
 - MOU dengan Pemerintah Propinsi Bali melalui perjanjian kerjasama Nomor: 075/28/KS/2016 tentang Pelaksanaan Pelayanan Penderita Tuberculosis Multi Drug Resistance (TB MDR) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng
 - MOU dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju melalu perjanjian kerjasama Nomor: 075/30/KS/2016 tentang Transmigrasi (UPT) Sinyonyoi Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat

- MOU dengan Pemerintah Propinsi Bali melalui perjanjian kerjasama Nomor: 075/32/KS/2016 tentang Pembiayaan Penerima Peserta Bantuan Iuran (PBI) Daerah Program JKN-KIS.
- 10. Tahun 2016 ijin investasi yang mendapat rekomendasi berjumlah 156 ijin, yang berarti meningkat dari ijin investasi yang diterbitkan pada Tahun 2015 yang berjumlah 150 ijin investasi.
- 11. Tahun 2016 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Buleleng berjumlah 9.912 orang. Berdasarkan pangkat dan golongan komposisi PNS Kabupaten Buleleng Tahun 2016 adalah ; Pembina Utama (IV/e) ; 2 orang, Pembina Utama Madya (IV/d) ; 5 orang, Pembina Utama Muda (IV/c) ; 37 orang, Pembina Tk.I (IV/b) ; 377 orang, Pembina (IV/a) ; 3.545 orang, Penata Tk.I (III/d) ; 1.093 orang, Penata (III/c) ; 902 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) ; 1.270 orang, Penata Muda (III/a) ; 767 orang, Pengatur Tk.I (II/d) ; 303 orang, Pengatur (II/c) ; 694 orang, Pengatur Muda Tk.I ; 448, Pengatur Muda (II/a) ; 316 orang, Juru Tk.I (I/d) ; 40 orang, Juru (I/c) ; 74 orang, Juru Muda Tk.I (I/b) ; 23 orang dan Juru Muda (I/a) ; 16 orang. Eselonering yang terisi dari jabatan yang tersedia pada seluruh SKPD Tahun 2016 meliputi ; Pejabat Eselon II.A ; 1 orang, Eselon II.B ; 34 orang, Eselon III. A ; 53 orang, Eselon III.B ; 108 orang, Eselon IV.A ; 483 orang, Eselon IV.B ; 161 orang dan Eselon V.A: 49 orang
- 12. Tahun 2016 pendapatan asli daerah terealisasi sebesar Rp. 282.111.205.871,44 dengan capaian 89,41 persen dari target yang direncanakan yang berjumlah sebesar Rp. 315.526.783.349,70. Pencapaian kinerja pendapatan daerah yang bersumber dari PAD tercapai dari kontribusi Pajak daerah yang terealisasi sebesar 102.239.556.549,13, Retribusi Daerah sebesar Rp. 15.126.587.042,00. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 15.030.436.696,73 dan Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah yang terealisasi sebesar Rp. 149.714.625.583,58
- 13. Tahun 2016 Dana Perimbangan terserap sebesar Rp. 1.305.606.678.444,00, realisasi ini tercapai 90,04 persen dari target yang direncanakan yakni sebesar Rp. 1.449.970.563.193,00. Realisasi dana perimbangan meliputi realisasi Bagi hasil pajak sebesar Rp. 25.037.659.194,00, realisasi bagi hasil bukan pajak / sumber daya alam sebesar Rp.3.982.580.491,00, realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 982.698.080.000,00 dan Dana Alokasi

khusus yang terealisasi sebesar Rp. 293.888.358.759,00. Selanjutnya pendapatan transfer yang bersumber dari transfer pemerintah pusat lainnya berupa dana penyesuaian dengan realisasi sebesar Rp. 246.094.937.832,28 dan dana transfer daerah lainnya dalam bentuk pendapatan bagi hasil pajak yang terealisasi sebesar Rp. 204.521.694.024,66, dan bantuan keuangan pada Tahun 2016 yang terealisasi sebesar Rp. 27.611.028.570,00.

14. Kinerja pembiayaan daerah tercapai sebesar Rp. 162.928.843.959,34 atau 102,84 persen dari target pembiayaan daerah tahun 2016. Capaian kinerja pembiayaan daerah berasal dari kontribusi capaian kinerja pembiayaan penerimaan daerah yang terealisasi sebesar Rp. 163.028.843.959,34, berbanding jumlah pembiayaan pengeluaran daerah sebesar Rp. 100.000.000. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran [SILPA] pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 28.627.296.354,29

t. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Alokasi dan realisasi belanja langsung pelaksanaan program dan kegiatan pada BPMPD Kabupaten Buleleng Tahun 2016 bersumber dari Belanja daerah yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 7.459.043.168,26 dan terealisasi sebesar Rp. 7.372.071.886,00 atau 98,83 persen, dengan rincian Belanja Pegawai terealisasi Rp. 3.561.326.664,00, Belanja Barang dan Jasa terealisasi Rp. 3.782.397.922,00, Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 28.347.300,00,.

Capaian kinerja pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat ditunjukkan melalui indicator :

- PKK Aktif di Kabupaten Buleleng sebagai hasil bagi jumlah kelompok PKK aktif 148 dari jumlah keseluruhan PKK 148 kelompok atau mencapai 100 persen.
- Posyandu aktif sebagai hasil bagi jumlah posyandu aktif 717 dengan total jumlah posyandu 717 atau mencapai 100 persen.

u. Urusan Sosial,

Alokasi dan realisasi belanja langsung pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2016 bersumber dari Belanja daerah yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 22.460.781.380,00

dan terealisasi sebesar Rp. 22.326.121.697,00 atau 99,40 persen, dengan rincian Belanja Pegawai terealisasi Rp. 3.292.948.896, Belanja Barang dan Jasa terealisasi Rp. 4.723.531.131,00, Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 14.309.641.670,00.

Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Sosial pada Tahun 2016 meliputi :

- Persentase (%) PMKS dalam 1 tahun yang memperoleh bantuan sosial, Tahun 2016 Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial berjumlah 24.039 orang dan bantuan terealisasi kepada 14.697 orang.
- Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis (Orang) pada Tahun 2016 di Kabupaten Buleleng mencapai 2,6 persen meningkat dari Tahun 2015 yang hanya mencapai 1,79 persen.
- Jumlah panti sosial skala kabupaten/ kota dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (Unit) di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2015 berjumlah 19 panti sosial, yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial berjumlah 19 panti sosial.

v. Urusan Kebudayaan,

Alokasi dan realisasi belanja langsung pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2016 bersumber dari Belanja daerah yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 20.886.154.173,85 dan terealisasi sebesar Rp. 20.143.124.263,00 atau 96,44 persen, dengan rincian Belanja Pegawai terealisasi Rp. 6.560.882.727,00, Belanja Barang dan Jasa terealisasi Rp. 10.691.933.653,00, Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 2.890.307.883,00. *Alokasi belanja daerah tersebut termasuk alokasi belanja untuk Urusan Pariwisata.*

Indikator kinerja Urusan Kebudayaan adalah :

1. Penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 29 kali selama Tahun 2016.
2. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya sejumlah 16 sarana.
3. Benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan sebanyak 100 persen dimana Benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

sebanyak 426 buah sedangkan Benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki daerah berjumlah 426 buah.

w. Urusan Kearsipan,

Alokasi dan realisasi belanja langsung pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Rp.99.699.830 dan terealisasi Rp. 95.467.471 atau 95,75 persen.

.Tingkat capain kinerja penyelenggaraan Urusan Kearsipan pada Tahun 2016 meliputi :

- Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku mencapai 100 persen, hasil ini sebagai perbandingan jumlah SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku yang berjumlah 39 SKPD dibagi jumlah seluruh SKPD sebanyak 39 SKPD.
- Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan, 3 kegiatan.

x. Urusan Perpustakaan,

Alokasi dan realisasi belanja langsung pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 bersumber dari Belanja daerah yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 2.783.224.116,25 dan terealisasi sebesar Rp. 2.746.611.531,00 atau 98,68 persen, dengan rincian Belanja Pegawai terealisasi Rp. 1.910.010.456, Belanja Barang dan Jasa terealisasi Rp. 755.049.175,00, Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 81.551.900,00. *Alokasi belanja daerah tersebut termasuk alokasi untuk Urusan Kearsipan.*

Tingkat capain kinerja penyelenggaraan Urusan Perpustakaan pada Tahun 2016 meliputi :

- Koleksi buku yang ada di perpustakaan daerah dengan rasio 0,50, hasil ini sebagai perbandingan jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah, 10.552 judul dibagi jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, sebanyak 21.103 buku.
- Jumlah pengunjung perpustakaan, mencapai rasio 0,014 dimana jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun berjumlah 8.948 kunjungan dibagi jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani yang berjumlah 629.188 orang.
- Sejak Tahun 2014 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buleleng merintis penggunaan ID Card untuk identitas bagi anggota perpustakaan. Di tahun 2015 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kabupaten Buleleng meluncurkan katalog buku yang berbasis IT. Dimana dalam istilah asing sering di sebut E-Library (Perpustakaan Elektronik) dan OPAC (On line Public Acces Catalog). Dimana koleksi buku-buku yang ada di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buleleng dapat di akses lewat internet sehingga mempermudah para pemustaka untuk menemukan buku-buku yang diperlukan sebelum berkunjung ke perpustakaan. Alamat website E-Library/OPAC Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buleleng : <http://bulelengkab.go.id> . Website resmi Kabupaten Buleleng. Disana terpampang PROGRAM UNGGULAN SKPD, Katalog On Line.

2. Urusan Pilihan.

a. Urusan Perikanan dan Kelautan,

Alokasi dan realisasi belanja langsung pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng Tahun 2016 bersumber dari Belanja daerah yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 11.379.191.816,95 dan terealisasi sebesar Rp. 10.898.484.306,00 atau 95,78 persen, dengan rincian Belanja Pegawai terealisasi Rp. 5.637.612.427,00 Belanja Barang dan Jasa terealisasi Rp. 3.796.771.297,00 Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 1.464.100.600,00.

Capaian kinerja pembangunan Urusan Perikanan dan Kelautan ditunjukkan melalui indikator – indikator sebagai berikut :

1. Produksi perikanan 104,27 persen hasil ini sebagai perbandingan jumlah produksi perikanan Kabupaten Buleleng mencapai 19.949,0 Ton dibagi target produksi Tahun 2016 yang berjumlah 19.131,6 Ton.
2. Konsumsi Ikan mencapai 100,29 persen, hasil ini sebagai perbandingan jumlah konsumsi ikan per kapita di Kabupaten Buleleng 33,60 kg/kp/Thn dibagi target konsumsi ikan daerah sebesar 33,50 Kg/Kp/Thn.

b. Urusan Pertanian,

Alokasi dan realisasi belanja langsung pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun 2016 bersumber dari Belanja daerah yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 26.255.198.818,57 dan terealisasi sebesar Rp. 25.635.028.482,00 atau 97,64 persen, dengan rincian Belanja Pegawai terealisasi Rp. 13.167.936.204



Belanja Barang dan Jasa terealisasi Rp. 10.956.129.278,00 Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 1.510.963.000,00. *Belanja daerah tersebut termasuk belanja untuk Urusan Ketahanan Pangan.*

Capaian kinerja pembangunan bidang pertanian ditunjukkan melalui indikator berikut ini:

1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal per hektar 0,007 Ton/Ha, hasil ini sebagai rasio perbandingan Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya 137 (ton) dibagi Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya 22.666 (ha)
2. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB adalah 22,86 persen, Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Pertanian 5.827.841,72 juta Rupiah dibagi Jumlah total PDRB 25.491.797,49 juta Rupiah.

c. Urusan Kehutanan,

Alokasi dan realisasi belanja langsung pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Buleleng Tahun 2016 bersumber dari Belanja daerah yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 13.805.518.647,89 dan terealisasi sebesar Rp. 11.792.891.863,00 atau 85,42 persen, dengan rincian Belanja Pegawai terealisasi Rp. 7.345.700.367,00 Belanja Barang dan Jasa terealisasi Rp. 4.111.982.496,00 Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 335.209.000,00.

Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Kehutanan pada Tahun 2016 meliputi :

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis.
Luas lahan kritis dalam kawasan hutan yang direhabilitasi dalam tahun 2016 seluas 1.000 Ha. Luas total lahan kritis dalam kawasan hutan adalah 91.031,84 Ha, tingkat realisasi capaian rehabilitasi lahan kritis dalam kawasan adalah 1,09 persen.
2. Kerusakan Kawasan Hutan.
Luas kerusakan kawasan hutan akibat kebakaran tahun 2016 seluas 2 Ha, atau 0,0039 persen dari Luas total kawasan hutan yaitu 51.436,21 Ha.

d. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral,

Alokasi dan realisasi belanja langsung pelaksanaan program dan kegiatan Urusan energy dan SDM pada Dinas PU Kabupaten Buleleng Tahun 2016 :

dianggarkan Rp. 22.162.776.989,00 dan terealisasi Rp. 21.298.564.058,00, atau sebesar 96,10 persen.

Capaian kinerja pelaksanaan urusan energy dan sumber daya mineral ditunjukkan melalui indikator berikut :

1. Pertambangan tanpa ijin, 37,40 persen, luas penambangan liar yang ditertibkan seluas 5.035 Hektar dari keseluruhan luas areal penambangan liar seluas 13.463 Hektar.
2. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB, 1,21 persen. Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Pertambangan 309,35 milyar rupiah dari total PDRB yang berjumlah 25.491,79 milyar rupiah.

e. Urusan Pariwisata,

Alokasi dan realisasi belanja langsung pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2016 : Belanja Pegawai terealisasi Rp. 59.655.000,00, Belanja Barang dan Jasa terealisasi Rp. 1.961.806.083,00, Belanja Modal terealisasi Rp. 1.303.923.900,00.

Capaian kinerja urusan pariwisata pada Tahun 2016 ditunjukkan melalui indikator berikut :

1. Jumlah kunjungan wisatawan Tahun 2016 mencapai 555.080 orang
2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 1,21 persen, Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata 309,35 milyar rupiah dari total PDRB yang berjumlah 25.491,79 milyar rupiah.

f. Urusan Perdagangan,

Alokasi dan realisasi belanja langsung pelaksanaan program dan kegiatan Urusan perdagangan pada Diskopdagrin Kabupaten Buleleng Tahun 2016 : Belanja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 21.510.000,00 dan terealisasi Rp. 11.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran Rp. 480.847.725,00 terealisasi Rp. 235.603.490,00, Belanja Modal dengan anggaran Rp. 15.193.933.890,00 dan terealisasi Rp. 10.977.955.120,00.

Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Perdagangan pada Tahun 2016 yaitu :

1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB, 11,43 persen.



2. Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan 2.915,78 milyar rupiah dibagi jumlah total PDRB, 25.491,79 milyar rupiah.

g. Urusan Industri,

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Industri dialokasikan melalui meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.700.000 dan tidak ada realisasi, dan Belanja barang dan Jasa dengan anggaran Rp. 383.095.300 dan terealisasi Rp. 305.958.500 atau 79,86 persen.

Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Industri pada Tahun 2016 yaitu :

1. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, 5,97 persen, Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industry 1.523,19 milyar rupiah dibagi jumlah total PDRB 25.491,79 milyar rupiah.
2. Pertumbuhan Industri secara keseluruhan 2,83 persen, Jumlah industri s.d tahun 2015 : 954 industri dikurangi jumlah industri sd tahun 2014: 927, dan dibagi jumlah industri s/d tahun 2015. Sehingga tahun 2016 terjadi kenaikan jumlah industry sebesar 2,83 persen.

h. Urusan Transmigrasi,

Alokasi dan realisasi belanja langsung pelaksanaan program dan kegiatan urusan transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng Tahun 2016 dengan anggaran Rp. 174.040.935,00 dan terealisasi Rp. 161.164.600,00 atau mencapai 92,60 persen

Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan Urusan transmigrasi pada Tahun 2016 yaitu : terwujudnya penempatan 14 KK transmigran.

3. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

a. Tugas pembantuan yang diterima.

1. Bidang Perikanan dan Kelautan.

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng dalam tahun 2016 memperoleh Program/Kegiatan yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan (TP) dengan total anggaran sebesar Rp.1.915.000.000, namun berdasarkan surat Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP RI No.479/PRL.5/IV/2016 tanggal 25 April 2016, terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 641.525.000, dimana sudah diajukan RKA/KL ke pusat, namun setelah disetujuinya DIPA/RKA-KL tanggal 26

Juli 2016 efisiensinya menjadi Rp.728.985.000, sehingga total anggaran setelah efisiensi sebesar Rp.1.186.015.000,

Dasar Hukum dari Program Pengelolaan Ruang Laut adalah SP DIPA – 032.07.4.229175/2016, Tanggal 07 Desember 2016 dari Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Dasar Hukum dari Program Pengelolaan Ruang Laut adalah SP DIPA Revisi 01 – 032.07.4.229175/2016, Tanggal 26 Juli 2016 dari Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Pemberi tugas dari program/kegiatan yang bersumber dari dana Tugas pembantuan (TP) yaitu Program Pengelolaan Ruang Laut, dengan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha diberikan oleh Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Program /Kegiatan yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan(TP) yaitu Program Pengelolaan Ruang Laut, dengan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan pulau Pulau Kecil, dengan Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha dengan Anggaran sebesar Rp.1.186.015.000, Realisasi fisik mencapai 100,00%, sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp.1.017.061.458,- atau mencapai 85,75% dengan sisa anggaran sebesar Rp.168.953.542,- Adapun kegiatan fisiknya berupa pengadaan Geisolator 17.100 m², pengadaan traktor 2 unit, pembangunan gudang garam 1 paket, pengadaan kendaraan roda dua 2 unit. Kegiatan fisik tersebut dihibahkan kepada Koperasi Produsen Bumi Putih Nusantara Desa.Pejarakan,Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan (TP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bersumber dari dana APBN dengan jumlah total anggaran yang diperoleh sebesar Rp.1.186.015.000,-

2. Bidang Ketenagakerjaan.

Dengan dasar hukum DIPA Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2016 No. SP DIPA – 026.04.4.220149/2016, Tanggal : 7 Desember 2015, Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Buleleng melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Penugasan ini dituangkan melalui Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja yang dijabarkan melalui Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja. Pembiayaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan bersumber dari dana APBN yaitu DIPA Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

1.762.175.000,00. Realisasi anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan sebesar .731.480.400 atau 98,26 persen dan realisasi fisik kegiatan mencapai 100 persen.

3. Bidang Pertanian.

A. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Tahun 2016.

Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng pada Tahun 2016 tertuang dalam Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura, dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2016 dengan nomor SP DIPA-018.04.4.229034/2016 Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng (229034); tanggal 7 Desember 2015 dengan perubahan Revisi 03 tanggal 30 September 2016;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Rincian Kertas Kerja Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng (229034) tahun anggaran 2016;
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 65/Permentan/RC.130/12/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota tahun anggaran 2016;
4. Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 520/29/HK/2016 tanggal 6 Januari 2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016;
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/13/Horti/Distanak tanggal 7 Januari 2016 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Personalia Pengelola Anggaran pada Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/12/Horti/Distanak tanggal 7 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan

- Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Lingkup Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016;
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/754/Horti/Distanak tanggal 22 Pebruari 2016 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Kawasan Jeruk dan Desa Organik dari Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Lingkup Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016;
 8. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/755/Horti/Distanak tanggal 22 Pebruari 2016 tentang Penetapan Calon Petani Calon Lahan/CPCL Kawasan Jeruk dari Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Lingkup Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016;
 9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/868/Horti/Distanak tanggal 1 Maret 2016 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Pengembangan Kawasan Bawang Merah dan Cabai Rawit Merah Dari Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Lingkup Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016;
 10. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/869/Horti/Distanak tanggal 1 Maret 2016 tentang Penetapan Calon Petani Calon Lahan/CPCL Penerima Bantuan Pengembangan Kawasan Bawang Merah dan Cabai Rawit Merah dari Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Lingkup Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016;
 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/3372/Horti/Distanak tanggal 23 Agustus 2016 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Kawasan Jeruk (APBN-P) dari Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Lingkup Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016;
 12. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/3373/Horti/Distanak tanggal 23 Agustus 2016 tentang Penetapan Calon Petani Calon Lahan/CPCL Kawasan Jeruk (APBN-P) dari

Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Lingkup Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016;

13. Pedoman Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Tahun 2016;
14. Pedoman Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2016;
15. Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2016;

Yang memberikan Tugas Pembantuan Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 adalah Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian. Program Tugas Pembantuan yang diberikan pada Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng dituangkan melalui 3 kegiatan yang terdiri dari Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura dan Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura.

Pembiayaan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura yang dibagi menjadi 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura serta Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan (TP) Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016. Total anggaran untuk Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura sebesar Rp. 4.142.500.000, dengan jumlah anggaran masing-masing kegiatan meliputi Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat dengan jumlah anggaran Rp. 2.382.500.000, Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura dengan jumlah anggaran Rp. 140.000.000, dan Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura dengan jumlah anggaran Rp. 1.620.000.000.

B. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016.

Sebagai dasar pelaksanaan Tugas Pembantuan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan adalah sebagai berikut :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2016 dengan nomor SP DIPA-018.03.4.229071/2016 Satker Dinas Pertanian dan



- Peternakan Kabupaten Buleleng (229071) tanggal 7 Desember 2015 dengan perubahan Revisi 04;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Rincian Kertas Kerja Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng (229071) tahun anggaran 2016;
 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 65/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Penugasan kepada Bupati/Walikota dalam pelaksanaan kegiatan dan tanggung jawab pengelolaan dana tugas pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015;
 4. Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 520/29/HK/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016;
 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/116/PPPw/DISTANAK tentang Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Personalia Pengelola Anggaran pada Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 tanggal 11 Januari 2016;
 6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/1230/PPPw/DISTANAK tentang Pengesahan Kelompok tani Penerima Bantuan Pengembangan Budidaya Kedelai Tahun Anggaran 2016;
 7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/1231/PPPw/DISTANAK tentang Pengesahan Kelompok tani Penerima Bantuan Penanaman Padi Jajar Legowo (Jarwo) Tahun Anggaran 2016;
 8. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/1232/PPPw/DISTANAK tentang Pengesahan Kelompok tani Penerima Bantuan Gerakan Pengembangan Desa Pertanian Organik Untuk Padi Tahun Anggaran 2016;
 9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/1233/PPPw/DISTANAK tentang Pengesahan Kelompok tani

- Penerima Bantuan Pengembangan Jagung Hibrida Tahun Anggaran 2016;
10. Petunjuk Teknis Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi Tahun 2016;
 11. Petunjuk Teknis Teknologi Tanam Jajar Legowo Tahun 2016;
 12. Petunjuk Teknis Gerakan Pengembangan Jagung Hibrida 2016;
 13. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Kedelai dan Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2016;

Yang memberikan Tugas Pembantuan Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng (229071) Tahun Anggaran 2016 adalah Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan di Jakarta.

Program Tugas Pembantuan yang diberikan pada Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng adalah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dengan tiga kegiatan yang terdiri dari : Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia dan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan.

Pembiayaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan yang dibagi menjadi tiga kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia, dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan (TP) Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016.

Total anggaran untuk Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan sebesar Rp. 5.627.464.000,- realisasinya sebesar 5.039.866.325,- (89,56%) yang dibagi menjadi tiga kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Produksi aneka kacang dan umbi dengan jumlah dana Rp. 320.731.000,- realisasinya 253.500.750,- (79,04%), Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia dengan jumlah dana Rp. 5.187.842.000,- realisasinya sebesar 4.690.786.500,- (90,42%) dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan pagu dananya sebesar Rp.118.891.000,- realisasinya sebesar Rp. 95.579.075,- (80,39%).

Lokasi Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan umbi terletak di kecamatan Buleleng, dan Lokasi Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia terletak di 9 Kecamatan yaitu Kecamatan

Tejakula, Kubutambahan, Sawan Sukasada, Buleleng, Banjar, Seririt, Busungbiu dan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

Dana yang digunakan dalam melaksanakan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan yang terdiri dari Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan (TP) Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016. Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan sebesar Rp. 5.627.464.000, dan terealisasi sebesar Rp. 5.039.866.325, atau 89,56 dan capaian fisik kegiatan mencapai 100 persen.

4. Bidang Kehutanan dan Perkebunan.

Tugas pembantuan yang dituangkan melalui Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan dan Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian diberikan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Program – Program tersebut dituangkan melalui kegiatan ; pengembangan optimalisasi lahan, pengembangan perluasan areal, Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar dan penanamn kapas.

Sumber anggaran dialokasikan melalui anggaran APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebesar Rp. 1.650.000.000 yang realisasinya mencapai 100 persen.

a. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Tahun Anggaran 2016 tidak ada kegiatan pemberian tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten Buleleng.

1. Tugas Umum Pemerintahan.

a. Kerjasama Antar Daerah

Perjanjian Antar Daerah yang telah dilakukan dan masih berlaku sampai dengan Tahun 2016, yaitu :

1) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.

Sebagai penjabaran Pelaksanaan Urusan Trasmigrasi, Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi kabupaten Buleleng mengadakan kerjasama dengan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 075/19/KB/2012 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi Di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Buleleng Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Maksud dan tujuan pelaksanaan kerjasama antara kedua daerah adalah untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan semua potensi yang ada di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Morowali, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di kedua daerah tersebut. **Jangka waktu pelaksanaan kerjasama adalah dari tahun 2012-2016**, dan dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir, sepanjang memenuhi ketentuan atau syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Kegiatan kerjasama ini dijabarkan dalam pelaksanaan program Transmigrasi Regional yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng melalui kegiatan Pemberangkatan/ Penempatan Transmigrasi dan Peninjauan Lokasi Transmigrasi dengan anggaran pembiayaan dari APBD Kabupaten Buleleng sebesar Rp. 25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp23.845.300,00 atau 95,38%. Hasil kerjasama yang dilaksanakan adalah :

- a) Diberangkatkannya 13 KK transmigran asal Kabupaten Buleleng ke Unit Pemukiman Trasmigrasi (UPT) Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.
- b) Tersedianya lahan bagi para trasmigran asal Kabupaten Buleleng sesuai kebutuhan dengan perolehan lahan seluas 2 Ha untuk tiap kepala keluarga dengan perincian : lahan pekarangan seluas 0,10 Ha, lahan usaha I (siap olah) seluas 0,90 Ha, lahan usaha II (kondisi belum siap) seluas 1 Ha.

2) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada tahun 2013 berdasarkan perjanjian kerjasama nomor : 075/11/KS/2013 – 28 Tahun 2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi Di Unit Pemukiman

Transmigrasi (UPT) Tumbang Jutuh Kec. Rungan Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng mengadakan kerjasama bidang transmigrasi dengan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah melalui kegiatan peningkatan lokasi transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng, dengan pembiayaan dari APBD Kabupaten Buleleng sebesar Rp. 61.320.000,00. Penyelenggaraan kerjasama ini dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan semua potensi yang ada di Kabupaten Buleleng maupun di kabupaten Gunung Mas, dengan jangka waktu pelaksanaan kerjasama 5 (lima) tahun sejak perjanjian ini ditandatangani dan dapat diperpanjang bulan sebelum perjanjian ini berakhir. Hasil pelaksanaan kerjasama ini :

a) Diberangkatkannya 15 KK transmigran asal Kabupaten Buleleng ke Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Tumbang Jutuh SP.1 Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.

b) Tersedianya lahan siap olah bagi transmigran asal Kabupaten Buleleng sesuai kebutuhan dengan perolehan lahan seluas 2 Ha per KK dengan perincian : lahan pekarangan seluas 0,25 Ha , lahan usaha I ; 0,75 Ha, lahan usaha II ; 1 Ha, dan rumah tipe 36 M2.

3) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan Kesepakatan Bersama Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 181/28/XI/2016-075/29/KB/2016 dan Perjanjian Kerjasama Nomor : 181/29/XI/2016-075/30/KS/2016 tanggal 24 Nopember 2016. Ruang lingkup kerjasama yaitu penyelenggaraan transmigrasi di lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Sinyonyoi Kecamatan kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Mamuju menyediakan bagi 10 KK dari Kabupaten Buleleng sesuai kebutuhan untuk transmigrasi yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain atau bermasalah dengan perolehan lahan seluas 2 Ha tiap KK dengan

perincian ; lahan pekarangan seluas 0,25 Ha, lahan usaha I seluas 0,75 Ha dan lahan usaha II seluas ; 1 Ha (dalam bentuk hutan).

4) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan kesepakatan bersama Nomor 15/KB/HK/2016-075/22/KB/2016, dan perjanjian kerjasama Nomor :16/PKS/HK/2016-075/23/KS/2016, tanggal 19 September 2016, Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Pemerintah Kabupaten Ngada melaksanakan kesepakatan bersama melalui kegiatan pembangunan dan pengembangan sektor pertanian berbasis agribisnis dalam rangka menciptakan keterpaduan pembangunan dan pengembangan sektor pertanian berbasis agribisnis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ngada dan Kabupaten Buleleng. Kesepakatan bersama tersebut ditindaklanjuti melalui perjanjian kerjasama tentang pengembangan usaha tani anggur berbasis manajemen dan teknologi. Tujuan dilaksanakannya kerjasama ini adalah untuk menghasilkan produk usaha tani anggur yang dilakukan melalui konsep manajemen dan teknologi serta menciptakan produk – produk unggulan daerah yang berorientasi agrobisnis sebagai upaya perwujudan sarana penunjang ekonomi masyarakat. Ruang lingkup perjanjian kerjasama meliputi pengembangan usaha tani anggur dengan pemanfaatan lahan melalui sharing pengetahuan tentang pengembangan usaha tani anggur, sharing pengetahuan tentang system agrobisnis lahan melalui teknologi pengolahan tanah, pengairan, pemeliharaan, pengendalian organism pengganggu tananam dan pemupukan pada uasaha tani anggur ; dari hulu berupa input sarana prasarana dan sarana produksi sampai hilir berupa teknologi panen, pasca panen dan pemasaran.

5) Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten Badung.

Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten Badung Nomor : 075/17/KB/2016-134.4/2840/KB/Ad.Prem.Um/2016, tanggal 29 Juli 2016 tentang Distribusi dan Pemasaran Pangan antara Pemerintah Kabupaten

Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten Badung. Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk mewujudkan perpaduan yang sinergi saling membantu dalam distribusi dan pemasaran pangan, sejalan dengan spirit pola pembangunan semesta berencana. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mempercepat distribusi dan pemasaran pangan sehingga akses pangan masyarakat di Bali dan khususnya di Kabupaten Buleleng dan Badung menjadi lebih terjamin. Ruang lingkup kesepakatan bersama ini yaitu ; memantapkan sinergi kerjasama antara Kabupaten Buleleng dengan Badung sejalan dengan spirit pola pembangunan semesta berencana, penyediaan informasi tentang ketersediaan dan pemasaran pangan khususnya beras, cabai, kopi dan komoditas lainnya, memperkuat system yang telah dibangun melalui Tim Penanggulangan Inflasi Daerah di masing – masing kabupaten, memperkuat system smart city yang akan dibangun sehingga terwujud pola connecting, controlling dan managemen di bidang pangan serta memantapkan aksesibilitas pangan bagi masyarakat sebagai wujud ketahanan pangan masyarakat.

b. Perjanjian Antar Pemerintah.

1). Bidang Kesehatan.

1. Dalam bidang kesehatan Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng mengadakan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Bupati Buleleng dengan Gubernur Bali Nomor 075/2484/pem/2011 tanggal 8 Juni 2011 tentang Kerjasama Praktik Klinik Kebidanan dan Keterampilan Dasar Praktik Klinik. Maksud dari perjanjian ini adalah untuk melaksanakan pendidikan kebidanan dalam rangka meningkatkan keterampilan mahasiswa kebidanan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada masyarakat; Tujuan perjanjian adalah memperoleh sumber daya manusia yang terampil di bidang kebidanan. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani atau sampai Tahun 2016.
2. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Provinsi Bali yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor: 075/32/KS/2016-075/33/PKS/B.Pem/XII/2016 tanggal 19 Desember

2016 tentang pembiayaan peserta penerima bantuan iuran (PBI) daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk menyediakan dana pembayaran iuran peserta penerima bantuan iuran daerah dalam integrasi Jaminan Kesehatan Bali Mandara ke Program Jaminan Kesehatan Nasional. Ruang lingkup kerjasama ; mengintegrasikan program Integrasi Jaminan Kesehatan Bali Mandara ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, menyediakan anggaran untuk pembayaran iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah dan melakukan pembayaran iuran ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai jumlah peserta yang menjadi tanggungan. Peserta penerima bantuan iuran daerah Kabupaten Buleleng berjumlah 117.439, dengan besaran iuran per peserta Rp. 23.000 per bulan. Persentase sharing pembayaran bantuan iuran daerah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Provinsi Bali 51,97 persen berbanding 48,03 persen. Dana yang harus dibayarkan Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai tindaklanjut perjanjian kerjasama ini adalah Rp. 16.845.121.330,80.

3. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Provinsi Bali yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor : 075/28/KS/2016-075/25/PKS/B.Pem/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016, tentang pelaksanaan pelayanan penderita tuberculosis multi drug resistance (TB MDR) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng. Pelaksanaan kerjasama ini dimaksudkan untuk mengembangkan program penanggulangan tuberculosis multi drug resistance dengan tujuan untuk menemukan, mengobati dan merawat pasien tuberculosis multi drug resistance. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi kegiatan tuberculosis multi drug resistance; pelayanan pasien penderita tuberculosis multi drug resistance di RSUD Kabupaten Buleleng ; pelayanan pasien tuberculosis multi drug resistance diperuntukkan hanya untuk WNI. Segala biaya yang timbul untuk kegiatan bersumber dari anggaran Global Fund ATM, Komponen TB fase Ner Funding Model (NFM) 2016/2017.
4. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Provinsi Bali yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor : 075/12/KS/2016-075/15/PKS/B.Pem/X/2016 tanggal 28

Juni 2016, tentang Tenaga Pengajar dan Praktek Mahasiswa UPT. Akademi Kebidanan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Pelaksanaan kerjasama ini dimaksudkan untuk melaksanakan pembelajaran teori dan praktikum di kelas/Lab UPT. Akademi Kebidanan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, pembelajaran teori dan praktikum kebidanan dalam tatanan pelayanan nyata di fasilitas pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dan RSUD Kabupaten Buleleng. Tujuannya adalah untuk memperoleh sumber daya manusia yang kompeten di bidang kebidanan dalam rangka meningkatkan kompetensi mahasiswa Diploma III Kebidanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2). Bidang Energi Sumber Daya Mineral.

Kesepakatan Bersama Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Gubernur Bali dan Bupati Buleleng. Bidang kerjasama yaitu Penelitian dan Pengembangan Pemanfaatan Gas Metan dari Sanitary Landfill TPA Sampah untuk bahan bakar dan Pembangkit Listrik di TPA Bengkala, Desa Bungkulan Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. SKPD Pelaksana Kerjasama adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng. Hasil kerjasama adalah termanfaatkannya gas metan di TPA Bengkala sebagai pembangkit energi alternatif bagi masyarakat di sekitar TPA Bengkala. Saat ini tindaklanjut kerjasama sudah pada fase melaksanakan tahap uji kinerja Peralatan Pembangkit Listrik dengan Gas Metan.

3). Bidang Kepegawaian.

1. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Kementerian Pertanian RI, yang dituangkan melalui Kesepakatan Bersama Nomor : 075/24/KB/2016-13.1/MOU/09/2016 tanggal 2 September 2016, tentang Pengadaan CPNS Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah kabupaten Buleleng dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian. Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan CPNS Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dari THL-TB Penyuluh Pertanian, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Penyuluh Pertanian PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang berkualitas dan berkompeten. Ruang lingkup kesepahaman bersama ini meliputi

perencanaan, seleksi, pengangkatan dan penempatan CPNS dari Pelamar THL-TB Penyuluh Pertanian.

2. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Kementerian Kesehatan RI, yang dituangkan melalui Kesepakatan Bersama Nomor : 075/04/KB/2016-HK.0501/11/875/2016 tanggal 5 April 2016, tentang Pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dari Pegawai Tidak Tetap Pusat. Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan PNS Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk kebutuhan jabatan dokter, dokter gigi dan bidan dari PTT pusat yang masih aktif terhitung mulai 1 September 2015.

4). Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Provinsi Bali yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor : 075/14/KS/2016-075/16/PKS/B.Pem/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016, tentang pembinaan bahasa/penyuluh bahasa, aksara dan sastra Bali. Perjanjian ini dimaksudkan untuk menjaga ketahanan budaya Bali untuk melestarikan, mengembangkan bahasa, aksara dan sastra Bali agar tidak punah dari ancaman globalisasi. Ruang lingkup perjanjian ini meliputi ; pelestarian dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara Bali, penempatan tenaga penyuluh bahasa bali di desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Buleleng.

5). Bidang Penyediaan Air Minum.

Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Pemerintah Kabupaten Jembrana, yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor : 075/13/PKS/B.PEM/VI/2016-075/10/KS/2016-415.4 /01 /PKS /Pem /2016, tanggal 15 Juni 2016 tentang Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan system Penyediaan Air Minum Regional Titab Provinsi Bali. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk melaksanakan percepatan kelengkapan sarana dan prasarana SPAM Regional Titab Provinsi Bali, mensinergikan pengelolaan SPAM Regional Titab Provinsi Bali, mewujudkan efesiensi, efektifitas dan produktifitas dalam penyediaan layanan air minum, memenuhi kebutuhan air secara kualitas, kuantitas dan kontinuitas dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan, derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buleleng dan Jembrana, perluasan pelayanan air minum secara berkelanjutan di Kabupaten



Buleleng dan Jembrana. Ruang lingkup perjanjian ini meliputi ; pengaturan tentang pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan SPAM Regional Titab Provinsi Bali, Pengembangan dan pengelolaan SPAM Regional Titab Provinsi Bali untuk Kabupaten Buleleng dan Jembrana meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan. Pembiayaan yang ditimbulkan akibat perjanjian kerjasama ini dibebankan melalui anggaran APBN, APBD Provinsi Bali, APBD Kabupaten Buleleng dan APBD Kabupaten Jembrana.

c. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga.

1. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan PT Tropical Ocean Prawn (PT. TOP), dengan dasar hukum Perjanjian kerjasama antara PT Tropical Ocean Prawn (PT. TOP) dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten Buleleng Nomor : 523.3/903/Diskanla/2013 tentang Perjanjian Sewa Pakai Fasilitas di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Bidang kerjasama adalah Sewa pakai fasilitas yang ada di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sangsit berupa 1 unit rumah jaga, kios, mess dan satu areal lahan di sebelah selatan SPDN yang digunakan sebagai kantor untuk fasilitas pengembangan udang dengan system aquapot. Dengan nama kegiatan sewa pakai fasilitas di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sangsit. Dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga ini tidak terdapat pembebanan anggaran pada APBD Kabupaten Buleleng (DPA Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng). Perjanjian sewa pakai fasilitas di Pangkalan Pendaratan ikan (PPI) Sangsit selama 5 tahun terhitung sejak 11 Pebruari 2013 sampai dengan 11 pebruari 2018. Hasil pelaksanaan kerjasama adalah adanya penerimaan dari perjanjian sewa pakai fasilitas di PPI Sangsit sebesar Rp.12.960.000,- per tahun.
2. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Mina Bahari, Dengan dasar hukum yaitu Perjanjian kerjasama antara Pemkab. Buleleng dengan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Mina Bahari Nomor : 028/2702/Perl/2012 - 024/KPN-MB/VII/2012 tentang Pemanfaatan/Pengelolaan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) di Pangkalan Pendaratan ikan (PPI) Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten

Buleleng. Bidang kerjasama adalah Pemanfaatan atau pengelolaan Solar Pocked Dealer Nelayan (SPDN) di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Dengan nana kegiatan pemanfaatan/pengelolaan Solar Pocked Dealer Nelayan (SPDN) di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sangsit. Perjanjian pemanfaatan/pengelolaan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) di PPI Sangsit selama 15 tahun terhitung sejak Tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan 2 Juli 2027.

3. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Yayasan Reef Chek Indonesia, dengan dasar hukum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah daerah Kabupaten Buleleng dengan Yayasan Reef Check Indonesia Nomor : 075/32/KS/PEM/2014 - 15/12-1/MOU/YRCI-3 Tentang Dana Bantuan Penelitian di Bidang Kelautan dan Terumbu Karang di Kabupaten Buleleng. Bidang kerjasama adalah Dana bantuan penelitian di bidang kelautan dan terumbu karang di Kabupaten Buleleng. Perjanjian dana bantuan penelitian di bidang kelautan dan terumbu karang di Kabupaten Buleleng selama 3 tahun terhitung sejak 3 Desember 2014 sampai dengan 3 Desember 2017. Hasil pelaksanaan kerjasama adalah tersedianya hasil penelitian tentang terumbu karang di Kabupaten Buleleng.
4. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan alamat Jalan Letkol Wisnu Nomor 2 Singaraja. Dengan dasar Hukum yaitu Surat Perintah Kerja Nomor : 027/146/Kominfo/2016, Tanggal : 14 Januari 2016 dan Surat Perjanjian Kerjasama, Nomor : 027/135/Kominfo/2016, Tanggal : 13 Januari 2016. Bidang Kerjasama yaitu kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi bidang kerjasama yang dilakukan adalah sewa jaringan internet Desa/Kelurahan dan kegiatan Fasilitasi Penyebarluasan Informasi bidang kerjasama yang dilakukan adalah penyediaan bandwidth untuk akses internet. Sumber dana pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi adalah dari APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016. Jumlah Anggaran yang digunakan sebesar Rp 105.754.000, dan Sumber dana pada Kegiatan Fasilitasi Penyebarluasan Informasi adalah dari APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 dengan jumlah Anggaran yang digunakan sebesar Rp553.443.000. Jangka Waktu Kerjasama yaitu sewa jaringan online sistem pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi adalah selama 12 (sebelas) bulan kalender terhitung mulai bulan 14 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 dan jangka waktu kerjasama penyediaan bandwidth untuk akses internet pada Kegiatan

Fasilitasi Penyebarluasan Informasi adalah selama 12 bulan terhitung mulai tanggal 13 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016. Hasil (Output) dari kerjasama pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi adalah berfungsinya jaringan komunikasi dan informasi (online) Pemkab sebanyak 95 titik. Hasil (Output) dari kerjasama pada Kegiatan Fasilitasi Penyebarluasan Informasi adalah lancarnya akses informasi melalui internet dan multimedia dan terlayannya akses internet bagi instansi pemerintah dan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi adalah masih banyaknya desa yang belum terjangkau oleh jaringan kabel Telkom sehingga kurang lancarnya akses informasi internet dan multi media. Dengan adanya masalah diatas diharapkan adanya pengembangan jaringan kabel Telkom dengan di buatkannya repearter / antena penerus untuk daerah-daerah yang belum di jangkau oleh kabel sehingga jaringan komunikasi dan informasi dan akses informasi melalui internet dan multimedia dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan.

5. Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan BPJS Kesehatan Cabang Singaraja yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor 075/21/KS/2016 – 33/KTR/XI-09/2016, tentang Pemanfaatan KTP Elektronik dan database kependudukan yang berbasis NIK dalam layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi dan peran Pemerintah Kabupaten Buleleng dan BPJS Cabang Singaraja dalam pemanfaatan KTP-el dan database kependudukan yang berbasis NIK untuk mengefektifkan penyelenggaraan Program I Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
6. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor 075/19/KB/2016 – 0658/SPK/DIR/DJA/2016, tertanggal 26 Juli 2016 tentang Pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara online dan pemanfaatan layanan jasa perbankan untuk menerima pembayaran pajak daerah. Perjanjian kerjasama ini untuk memberikan kemudahan bagi Kabupaten Buleleng dalam melakukan pemantauan dan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi dari PT. BPD Bali terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak setiap bulannya.
7. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan PT Baruna Indonesia yang dituangkan melalui Kesepakatan Bersama Nomor 075/07/KB/2016 tertanggal 18 Mei 2016, tentang pengembangan dan pengelolaan Bandar



Udara Letkol Wisnu di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Maksud dari kesepakatan bersama ini adalah untuk memberdayakan potensi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Buleleng dan PT. Baruna Indonesia dalam penggunaan dan pengembangan lahan serta pariwisata. Sedangkan tujuan dari perjanjian kerjasama ini yaitu untuk dapat memberikan suatu manfaat yang besar terutama dalam hal penggunaan dan pengembangan lahan – lahan dan Bandar Udara Letkol Wisnu sehingga dapat menghasilkan secara optimal serta dapat memberikan pelayanan secara optimal bagi peningkatan perekonomian daerah dengan mempertahankan dan memelihara kelestarian alam dan budaya serta kekhususan daerah sebagai kawasan pariwisata alami, unik dan anggun.

8. Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan BPJS Kesehatan Cabang Singaraja yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor 075/34/KS/2016 – 47/KTR/XI-09/2016, tertanggal 19 Desember 2016, tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan sebagai dasar pelaksanaan jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan sebagai PBI Daerah dalam Program JKN. Ruang lingkup kerjasama meliputi kepesertaan PBI Daerah Program JKN, pelayanan kesehatan peserta PBI Daerah JKN dan pembayaran iuran peserta PBI daerah. Jumlah maksimal peserta PBI Daerah di Kabupaten Buleleng sejumlah 117.439 jiwa, sedangkan jumlah awal yang didaftarkan Pemerintah Kabupaten Buleleng sejumlah 86.258 jiwa. Besaran iuran penduduk yang didaftarkan Pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 23.000 per jiwa per bulan. Jumlah total iuran yang harus disetorkan Pemerintah Kabupaten Buleleng per bulan sebesar Rp. 1.983.934.000.000,00.
9. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Universitas Panji Sakti Singaraja, yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor 075/06/KS/2016 – 055/UNIPAS/UM.01.01/V/2016 tertanggal 2 Mei 2016 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Panji Sakti Singaraja dan meningkatkan efisiensi, efektifitas, inovasi serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah Kabupaten Buleleng. Ruang lingkup pelaksanaan kerjasama meliputi Bidang Pendidikan yakni pengembangan kompetensi sumber daya manusia, Bidang penelitian meliputi ; kegiatan

ilmiah dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi bakti social dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

10. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor : 075/25/KS/2016-419/II.4/UND/IX/2016 tertanggal 24 September 2016 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pelaksanaan kerjasama dimaksudkan untuk menjadikan perguruan tinggi, khususnya Universitas Nasional Denpasar sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kabupaten Buleleng. Tujuan pelaksanaan kerjasama adalah meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pelaksanaan tugas Tri Darma Perguruan Tinggi Universitas Nasional Denpasar dan meningkatkan efisiensi, efektifitas, inovasi serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah dan pengembangan potensi sumber daya daerah Kabupaten Buleleng.

d. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah.

1. Pelaksanaan Koordinasi Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekekangan Karangasem , dengan dasar hukum Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Balai Besar Penelitian Pengembangan Budidaya Laut Gondol Nomor 075 / 34 / KS / PEM / 2014 - 31 / BALITBANG KP /BBPPBL / TU.210 /2014 Tentang Pemanfaatan Zona Penelitian Budidaya di Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak,Kabupaten Buleleng. Bidang kerjasama adalah Pemanfaaaan zone penelitian budidaya di Duusun Gondol, desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Dengan nana kegiatan pemanfaatan zona penelitian budidaya di Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, kabupaten Buleleleng. Perjanjian pemanfaatan zone penelitian budidaya di Dusun Gondol Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng selama 5 tahun, terhitung sejak 3 Desember 2014 sampai dengan 3 Desember 2019. Hasil pelaksanaan kerjasama adalah tersedianya dokumen hasil penelitian budidaya laut oleh Balai Besar Riset Budidaya Laut Gondol.
2. Koordinasi Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekekangan Karangasem, dengan dasar hukum Perjanjian Kerjasama anantara pemerintah daerah Kabupaten Buleleng

dengan Balai Produksi Udang unggul dan Keckerangan Karangasem Nomor : 075 / 35 / KB / Pem / 2014 -_ I/BPIU2K.K/HK/2014/XII/2014 tentang Pengembangan Instalasi Budidaya Keckerangan Wilayah Laut, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Bidang dan kegiatan kerjasama adalah Pengembangan instalasi budidaya keckerangan wilayah laut desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.. Perjanjian pengembangan instalasi budidaya keckerangan wilayah laut Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng terhitung sejak 3 Desember 2014 sampai dengan 3 Desember 2019. Hasil pelaksanaan kerjasama adalah adanya pengembangan budidaya keckerangan di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Dan belum ada permasalahan yang menjadi hambatan pelaksanaan kerjasama.

3. Koordinasi Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara. Dengan dasar hukum PP Nomor 99 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Perjanjian kerjasama antara Badan Kepegawaian Daerah Kab. Buleleng dengan Kantor Regional X BKN Denpasar, Nomor : 800/897/BKD & Nomor : 96/KR.X.K/2016. Materi pelaksanaan koordinasi Pembuatan Soal, Lembar Jawaban, Pengawasan dan Pemeriksaan Hasil Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Buleleng Tahun 2016 dan Pembinaan Pegawai Daerah melalui Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
4. Koordinasi Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Bali, melalui kesepakatan bersama Nomor : KEP-124/WPB.21/BD.03/2016-075/26/KB/2016 tertanggal 3 Oktober 2016, tentang penggunaan system informasi kredit program (SIKP). Materi koordinasi adalah pelatihan penggunaan SIKP, penatausahaan calon debitur potensial KUR dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIKP di Kabupaten Buleleng. Tujuan pelaksanaan koordinasi adalah untuk melaksanakan dan mengimplementasikan SIKP dengan lancar untuk mendukung Program KUR yang mendukung pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan memanfaatkan SIKP secara optimal khususnya dalam rangka monitoring dan evaluasi pembiayaan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
5. Koordinasi Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng, melalui kesepakatan bersama Nomor : 075/26/KB/2016

– 51081.001/KB/2016 tertanggal 4 Januari 2016, tentang pengembangan data dan informasi pembangunan. Materi koordinasi adalah Koordinasi dan sinkronisasi serta penyusunan data dan informasi pembangunan di bidang ekonomi, social, budaya, hukum, pemerintahan serta fisik dan sarana prasarana. Tujuan pelaksanaan koordinasi adalah untuk melakukan peningkatan dan penyempurnaan kualitas dan pengelolaan data oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng guna memperoleh data statistic yang akan dijadikan bahan analisa dan evaluasi berbagai program pembangunan daerah dan sebagai dasar pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

6. Koordinasi Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Balai Taman Nasional Bali Barat, yang dituangkan ke dalam kesepakatan bersama Nomor : KB 478/BTNBB-1/2016 – 075/03/KB/2016, tertanggal 4 Maret 2016 tentang Pemanfaatan Zona Religi/Budaya/Sejarah Taman Nasional Bali Barat untuk tujuan ritual keagamaan Umat Hindu dalam rangka penguatan fungsi kawasan pelestarian alam. Materi koordinasi meliputi perlindungan kawasan, tumbuhan dan satwa di Kawasan Taman Nasional Bali Barat, pelestarian keanekaragaman hayati dan pelaksanaan ritual keagamaan Umat Hindu serta sosialisasi bersama tentang ruang lingkup kerjasama. Tujuan pelaksanaan koordinasi adalah untuk mendukung amanat peraturan yang berlaku khususnya penguatan fungsi kawasan pelestarian alam dan pemanfaatan zona religi, budaya dan sejarah untuk Umat Hindu di Kabupaten Buleleng dalam kawasan Taman Nasional Bali Barat.

e. Pembinaan Batas Wilayah.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan batas Daerah, bahwa penegasan batas wilayah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Kabupaten Buleleng yang memiliki potensi pembangunan berupa luas wilayah yang cukup besar, yaitu 1.365,88 Km² atau 24,25% dari luas Provinsi Bali, berbatasan langsung dengan 5 (lima) kabupaten lain di Provinsi Bali, dengan batas-batas wilayah di Sebelah Barat Kabupaten Jembrana, Sebelah Utara Laut Bali, Sebelah Timur Kabupaten Karangasem dan di Sebelah Selatan Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung dan Bangli. Memperhatikan kondisi tersebut maka penetapan dan penegasan batas wilayah memiliki fungsi yang setrategis dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan

kewenangan pada berbagai fungsi bidang pemerintahan. Kebijakan yang ditempuh terkait penetapan dan penegasan batas wilayah diarahkan dalam rangka menginventarisasi, mengkaji, dan menetapkan dasar hukum tertulis maupaun tidak tertulis yang nantinya akan dijadikan dasar hukum dalam mensosialisasikan mekanisme penetapan dan penegasan batas wilayah tersebut. Dalam rangka penataan batas wilayah dengan Kabupaten lain, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Buleleng yang dituangkan melalui Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 130/7/HK/2016. Terkait batas wilayah Kabupaten Buleleng dengan kabupaten lainnya di Bali telah dilaksanakan kegiatan penegasan batas daerah secara pasti dilapangan. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Dirjen Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri RI pada tanggal 13 s/15 Pebruari 2013 di Balairung Jakarta Timur, yang diikuti oleh perwakilan dari 4 provinsi dan 17 perwakilan kabupaten / kota termasuk Kabupaten Buleleng. Dari hasil rapat tersebut bahwa melaksanakan kegiatan penegasan batas daerah secara pasti dilapangan antar Kabupaten Kota di Provinsi Bali dilaksanakan pada tahun 2013, dimana anggaran kegiatan pelaksanaan penegasan batas daerah dialokasikan melalui Anggaran Dana DEKON Tahun Anggaran 2013. Untuk kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bali ditegaskan untuk membantu dengan melibatkan instansi terkait sehingga pelaksanaan penegasan batas daerah tidak terjadi permasalahan serta dibuatkan Berita Acara Rapat dan Data Cakupan Wilayah Perbatasan Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung dan Bangli. Terkait hal tersebut selanjutnya Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Pertemuan/ Rapat Kordinasi, Fasilitasi dan Sosialisasi penegasan Batas Daerah secara pasti di lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 12 Juni 2013 di Hotel Harrads Denpasar, yang dihadiri oleh Para Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota se – Bali, Para camat yang ada di Perbatasan yaitu 6 (enam) Camat dari Kabuapen Buleleng, 3 (tiga) Camat dari Kabupaten Tabanan, 4 (empat) Camat dari Kabupaten Jembrana, 1 (satu) Camat dari Kabupaten Badung, 1 (satu) Camat dari Kabupaten Bangli, Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Penegasan Batas Daerah Provinsi Bali dan Instansi terkait di Provinsi Bali. Terhadap hasil lacak lapangan terhadap batas daerah antara kabupaten Buleleng dengan kabupaten Jembrana, badung, Tabanan dan Bangli telah dibuatkan berita acara penegasan dan penetapan batas daerah, yang nantinya dilaporkan ke Kementrian Dalam Negeri RI untuk ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Untuk batas wilayah antara Kabupaten Buleleng dan

Kabupaten Karangasem telah dilaksanakan penegasan dan penetapan pada Tahun 2006 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 36 Tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006, tentang batas daerah Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Karangasem. Tim Penetapan dan Pegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng Tahun 2016 ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 130/7/HK/2016. Pada Tahun 2016 kegiatan diprioritaskan bagi desa – desa yang mempunyai tingkat permasalahan kecil terkait batas desa. Perencanaan dimaksud penting untuk tercapainya sasaran kegiatan pada Tahun Anggaran 2016. Tim Penetapan dan Pegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng Tahun 2016 menetapkan perencanaan untuk kegiatan penetapan dan penegasan batas desa difokuskan di wilayah Kecamatan Kubutambahan meliputi segmen batas antara Desa Mengening – Tajun, Mengening – Tamblang, Mengening – Bontihing, Mengening-Pakistan dan Mengening – Satra (Kabupaten Bangli). Wilayah Kecamatan Sawan meliputi segmen batas antara Desa Giri Emas – Desa Bungkulan, Desa Giri Emas – Desa Sangsit dan melanjutkan penataan terhadap penetapan dan penegasan batas antara Desa Tampekan, Desa Sidetapa dan Desa Banjar Tegeha di Kecamatan Banjar. Secara keseluruhan proses deleniasi berjalan sesuai ekspektasi awal sebagaimana yang diharapkan. Anggaran yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Buleleng untuk pembiayaan kegiatan ini berupa belanja langsung yang berjumlah sebesar Rp. 237.950.000 dan terealisasi sebesar Rp. 215.863.270 atau mencapai 90,72 persen. Untuk Tahun 2016 sebagai hasil pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Desa/Kelurahan, telah disusun draf Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Tampekan Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dan draf Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Mengening Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng.

f. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan yang disebabkan baik oleh faktor alam dan / faktor non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat gejala alam yang terjadi. Kabupaten Buleleng dari letak geografis, keadaan geologis, iklim dan fisiografi yang “Nyegara Gunung “ merupakan daerah yang sering terjadi kerawanan terhadap bencana alam dimana terdapat wilayah perbukitan yang sering longsor, sering terjadi gelombang pasang, banjir, kekeringan, angin puting

beliung. Sepanjang Tahun 2016 bencana alam yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng meliputi :

- a. Tanah longsor ; Desa Munduk, Desa Lemukih, Desa Gitgit, Desa Tegallinggah, Desa Sangsit, Desa Pemuteran, Desa Tamblang, Desa Sudaji, Desa Pegadungan, Desa Selat, Desa Mayong, Kelurahan Banyuning, Desa Pegayaman, Desa Kayuputih, Desa Sepang, Desa Tista, Desa Penuktukan, Desa Pedawa, Desa Kedis, Desa Bondalem, Desa Tajun, Desa Mengening, Kelurahan Banjar Tegal, Kelurahan Sukasada, Desa Pancasari, Desa Kaliasem, Desa Kayuputih, Desa Gesing, Desa Ringdikit, Desa Bestala, Desa Unggahan, Desa Tinggarsari.
- b. Angin Putting Beliung ; Desa Kubutambahan, Desa Sulanyah, Desa Kedis, Desa Gobleg, Desa Bestala.
- c. Banjir ; Desa Tukadmungga, Kelurahan Seririt, Desa Penyabangan, Desa Banyupoh, Desa Musi, Desa Sudaji, Desa Lokapaksa, Desa temukus, Desa Baktiseraga, Desa Pancasari, Desa Kaliasem, Desa Banjarasem, Desa Pangkungparuk, Desa Patas.
- d. Kebakaran ; Desa Gesing, Desa Bondalem, Desa Bukti, Desa Pakisan, Desa Gobleg, Desa Pengastulan, Desa Pejarakan, Kelurahan Banyuning, Kelurahan Penarukan, Desa Pamaron, Desa Sudaji, Desa Sekumpul, Desa Kalibukbuk, Kelurahan Banjar Tegal, Desa Penuktukan, Desa Bebetin, Kelurahan Kampung Kajanan, Desa Tajun, Desa Galungan, Kelurahan Banjar Tegal, Desa Kaliasem, Kelurahan Seririt, Desa Patas, Desa Selat, Desa Silangjana, Desa Tinga – Tinga, Desa Gerokgak.
- e. Kekeringan ; Desa Sembiran, Desa Madenan, Desa Pangkungparuk.
- f. Gelombang Pasang dan Abrasi ; Desa Bukti, Desa Sangsit, Desa Tukadmungga, Desa Kalisada, Desa Umeanyar.

Sepanjang Tahun 2016 akibat bencana alam yang melanda sejumlah wilayah, maka kerugian yang diderita secara materi berkisar sekitar Rp. 25.000.000.000,00.

BPBD yang merupakan sebuah instansi yang berwenang dalam kaitan dengan penanggulangan bencana memiliki TUPOKSI yang telah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 memiliki fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan. Sumber dana yang digunakan dalam rangka kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 ini, sepenuhnya dianggarkan melalui APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2016 dengan rincian alokasi belanja yang terdiri atas alokasi belanja daerah sebesar Rp.7.898.874.368,89 dan terealisasi sebesar Rp. 7.659.362.797,00 atau 96,97

persen, yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp.4.617.868.857,76 dan terealisasi Rp.4.604.428.415,00 atau 99,71 persen dan anggaran belanja langsung sebesar Rp.3.281.005.529,13 dan realisasi anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp.3.054.934.382,00 atau mencapai 93,11 persen, yang meliputi : Belanja Pegawai dengan anggaran Rp.332.150.000,00 dan terealisasi Rp.329.790.000,00 atau 99,29 persen, Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp 2.948.855.529,13 dan terealisasi Rp. 2.725.144.382,00 atau mencapai 92,41 persen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku perangkat daerah yang menangani pencegahan dan penanggulangan bencana, pada Tahun 2016 didukung oleh personil sejumlah 62 Orang.

2. PENUTUP.

Demikian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan dalam Tahun Anggaran 2016 dengan tingkat capaiannya. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu ditekankan dalam laporan ini sehubungan dengan pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun anggaran 2016 sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 telah dilaksanakan. Pendapatan Daerah yang dirancang sebesar Rp. 2.216.158.179.471,89 realisasinya mencapai sebesar Rp. 2.066.054.109.742,38 atau sebesar 93,23 persen. Belanja Daerah yang dirancang sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23 realisasinya mencapai sebesar Rp.2.200.355.657.347,43 atau sebesar 92,66 persen. Kemudian penyerapan dana perimbangan dari Pemerintah oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 tercapai 90,04 persen dari target yang direncanakan. Dimana penyerapan dana perimbangan yang ditargetkan Rp. 1.449.970.563.193,00 realisasinya Rp.1.305.606.678.444,00. Dan Tahun 2016 PAD Kabupaten Buleleng realisasinya mencapai 89,41 persen. Dari target yang direncanakan sebesar Rp. 315.526.783.349,70 terealisasi sebesar Rp. 282.111.205.871,44.
2. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng meningkat dari tahun ke tahun. Selama tahun 2011-2015, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng cenderung mengalami peningkatan. Hingga puncaknya pada Tahun 2013 laju pertumbuhan mencapai 7,15 persen. Kemudian mengalami

perlambatan pada Tahun 2014 yang mencatat laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,96 persen. Dan Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng mencapai 6,11 persen. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada Tahun 2015, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng lebih tinggi 0,7 poin dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang mencapai 6,04 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng pada Tahun 2015 didorong oleh kategori informasi dan komunikasi sebesar 9,81 persen. Kemudian diikuti oleh jasa pendidikan yang mencapai sebesar 9,09 persen. Sedangkan kategori lainnya memiliki pertumbuhan dibawah 9 persen pada Tahun 2015. Bahkan terdapat satu kategori yang mengalami kontraksi yang cukup dalam pada Tahun 2015 yaitu pertambangan dan penggalian dengan kontraksi sebesar 7,70 persen. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Buleleng telah mengeluarkan larangan terhadap usaha – usaha penggalian pasir liar yang tidak memiliki ijin usaha.

3. PDRB Perkapita Kabupaten Buleleng Atas dasar harga Berlaku pada Tahun 2015 tercatat sebesar 34,78 juta rupiah. Angka ini masih dibawah PDRB Perkapita Provinsi Bali yang mencapai 42,66 juta rupiah. Namun disisi lain angka ini merupakan peningkatan sebesar 4,67 juta rupiah atau 14,43 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selama Tahun 2011 – 2015 rata – rata pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Buleleng mencapai 31 juta rupiah. Berdasarkan harga konstan Tahun 2010, maka PDRB Perkapita Kabupaten Buleleng Tahun 2015 sebesar 29,13 juta rupiah. Laju peningkatan PDRB perkapita atas dasar harga konstan mencapai 5,47 persen masih jauh lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Buleleng yang hanya mencapai 0,6 persen.
4. Disamping keberhasilan yang telah dicapai, disadari masih ada kekurangan atau kelemahan dalam penyelenggaraan umum pemerintahan dan pembangunan maupun dalam pelayanan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan dan kendala yang masih kita hadapi. Tentunya hal ini dapat diatasi dengan menumbuhkembangkan kerjasama dan partisipasi dari semua pihak. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang meliputi penyelenggaraan urusan desentralisasi yang mencakup pelaksanaan urusan wajib dan pilihan, tugas – tugas pembantuan serta tugas – tugas umum pemerintahan telah terlaksana dengan baik, hal ini terjadi melalui kerja sama dan hubungan yang harmonis

antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta serta seluruh komponen masyarakat Kabupaten Buleleng dalam kerangka Good Governace berlandaskan falsafah Tri Hita Karana.